

SKRIPSI

TINJAUAN HISTORIS-YURIDIS PERUBAHAN TATANAN HUKUM KOLONIAL MENUJU HUKUM NASIONAL



Oleh
MUH. NUR IMAM MARTONO
B 111 12 910

BAGIAN DASAR-DASAR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HISTORIS-YURIDIS PERUBAHAN TATANAN HUKUM KOLONIAL MENUJU HUKUM NASIONAL

SKRPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh :

Muh. Nur Imam Martono
B 111 12 910

Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Makassar
2017

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN HISTORIS-YURIDIS PERUBAHAN TATANAN HUKUM
KOLONIAL MENUJU HUKUM NASIONAL

Disusun dan diajukan oleh:
MUH. NUR IMAM MARTONO
B111 12 910

Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Dasar-Dasar Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Mei 2017
Dan Dinyatakan Diterima

Ketua,

Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19560607 198503 1 001

Sekretaris,

Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 19680711 200312 1 004

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH NUR IMAM MARTONO
Nomor Pokok	: B11112910
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Dasar
Judul Skripsi	: Tinjauan Historis-Yuridis Terhadap Perubahan Tatanan Hukum Kolonial Menuju Hukum Nasional

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2017



a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 003



ABSTRAK

Muh. Nur Imam Martono (B111 12 910). Tinjauan Historis-Yuridis Perubahan Tatahan Hukum Kolonial Menuju Hukum Nasional. Dibimbing oleh Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing I dan Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini adalah penelitian sejarah hukum yang terkait dengan perubahan tatahan hukum kolonial yang ditandai dengan berlakunya hukum kolonial Belanda di wilayah kolonial Hindia-Belanda (yang kemudian nantinya berubah menjadi Indonesia) hingga pada tatahan Hukum Nasional yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Sejak kedatangan pihak kolonial Belanda di Hindia-Belanda, terjadi beberapa dinamika perubahan hukum yang sempat tercatat dalam sejarahnya. Pemberlakuan kebijakan-kebijakan kolonial yang didasarkan atas kekuasaan Gubernur Jenderal yang bekerja atas nama Raja di Belanda pada saat VOC masih mendominasi kerja masyarakat saat itu menjadikan kesenjangan antara orang Belanda dan Pribumi. Kemudian upaya politik dalam penyadaran praktik hukum melalui *de bewuste rechtpolitiek* yang ditandai dengan pemberlakuan *Groundwet* 1848 dan *Regerings Reglement* 1854 menciptakan praktik hukum di Hindia-Belanda yang lebih modern dan menjamin adanya hak-hak sipil baik orang Belanda maupun Pribumi.

Setelah melalui beberapa dinamika perubahan hukum kolonial dikemudian hari, dinamika politik yang terjadi memaksa Belanda yang saat itu menduduki Indonesia harus melepasnya ke tangan Jepang. Pada era pendudukan Jepang (1942-1945) berubah pula tata hukum yang digunakan. Melalui *Osamu Seirei* dan beberapa hukum yang dibuat oleh kekaisaran Jepang saat menduduki Indonesia, orang Pribumi turut pula menjadi bagian dari praktik tatahan hukum saat itu. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai kemerdekaan Indonesia dan 18 Agustus 1945 yang menandai keberlakuan Undang-Undang Dasar 1945, menciptakan berlakunya tatahan hukum yang baru yakni tatahan hukum nasional Indonesia.

Kata Kunci : Perubahan Hukum, Hukum Kolonial, Hukum Nasional

ABSTRACT

Muh. Nur Imam Martono (B111 12 910). Historic-Juridical Review of Colonial Legal Order to National Legal Order. Guided by Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H. as First Preceptor and Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H. as Second Preceptor.

This research is legal historical research about the changing of colonial legal order that signed by applied of Netherland colonial legal order in

Netherland Indies colonial area (then will be Indonesia) to the national legal order that signed by the independence proclamation of Indonesia.

Since the colonial side of Netherland occupy in Netherland Indies, it's been some changing of the legal order wrote in history. Applied of colonial policies that based on the power of General Governor who work in the name of the king in Netherland when VOC still dominated civil society those time make trouble between Netherland people and the inlanders. Then the political will in legal practical awareness by *de bewuste rechtpolititiek* that signed by applied of *Groundwet* 1848 and *Regerings Reglement* 1854 created the more modern legal practical in Netherland Indies and ensure the civil rights both for Netherland people and inlanders.

Through after some dynamics of colonial legal changing in the next day, political dynamics made Netherland get forced while occupied Indonesia must left it to Japan. When Japan occupied era (1942-1945) the used legal order get changed to. By *Osamu Seirei* and other law that made by Japan Empire when occupied Indonesia, the Pribumi people get part of the legal order in that time. Then in 17th August 1945 that signed the Independence of Indonesia and 18th August 1945 that signed the applied of Undang-Undang Dasar 1945, created the applied of the new legal order namely the national legal order.

Keywords : Legal Order Changing, Colonial Legal Order, National Legal Order

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada awal dari segala apa yang dituju, pemberi hidup yang tak dihidupkan, Allah SWT. Atas rahmat dan rahim-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Historis-Yuridis Perubahan Tatahan Hukum Kolonial Menuju Hukum Nasional”*** ini. Tak lupa salam dan shalawat kepada Baginda Rosulullah Muhammad Saw. Kepada beliauulah, siapa dan segala apa menjadi petunjuk dunia dan setelahnya ini. Salam kepada keturunannya yang suci serta para sahabat setianya. Semoga kami termasuk orang-orang yang beruntung.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya selama penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Lentera hati yang jasanya tak bisa dihitung dengan angka, kedua orang tua penulis, Martono Leppo, S.Sos, M.Si dan Hj. Nurlela Sang, S.H. Terima kasih yang tak terhingga untuk cinta, do'a, kasih, dan sayangmu untuk anakmu, semoga Allah SWT menyayangi kita semua, amin.
2. Saudara penulis, Muh. Aan Dermawan dan Puput Nurma Indah. Terima kasih telah menjadi adik-adik yang baik, dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung atas kasihNya.
3. Ibu Rektor UNHAS, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu MA, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Ir. Junaedi Muhidong M.Sc,

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Prof. Dr. Syamsul Bachri S.H. M.S., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Ir. Abdul Rasyid, M.Si, dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kerjasama Prof. dr. Budu, Ph.D, SPM(K).

4. Dekan Fakultas Hukum Unhas, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Sarana dan Prasarana Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.
5. Dr. Anshory Ilyas, S.H, M.H., selaku Pembimbing I dan Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan terkait penelitian skripsi atau pun sekedar berdiskusi dengan penulis. Serta kepada Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H., dan Ilham Ari Saputra, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis sebagai bentuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Para pegawai perpustakaan Fakultas Hukum Unhas dan Perpustakaan Pusat Unhas atas bantuannya selama proses penelitian penulis.

7. Bapak dan ibu para pegawai akademik FH-UH, Pak Minggu, Pak Ramalan, Pak Ronny, Pak Usman, Kak Hasan, dan lainnya yang tak saya sebutkan.
8. Kawan-kawan PETITUM 2012, yang telah menjadi kawan seperjuangan selama menempuh kuliah yang tak bisa saya sebutkan satu per satu.
9. Kawan-kawan HALTE, Abi, Acha, Fikar, Adnan, Fajar, Amma', Aldy Cencola', Alfin, Alif, Dede, Angga, Diko, Edo, Edy, Cul, Fai, Fajar, Fiqhi, Fyand Dembele, Bille', Ifran, Tjoteng, Isman, Konduk, Luppi, Hilman, Awal, Inton, Fairuz, Tayeb, Taqwa, Pidu, Aan, Sasa, Sigit, Cuya, Zev, Dewa, Oni, dan kawan-kawan lainnya yang mungkin luput untuk disebutkan.
10. Kawan-kawan tercinta Selalu Sayang Mama (SSM), Aan, Akbar, Agi, Angga, Anshar, Aye, Ciwal, Dewi, Dita, Edwar Tata, Erwin, Fathir, Tiling, Fawzy, Helmy, Hiraz, Ilham, Imam Aprianto, Jaka, Johan, Jojo, Luthez, Fadhil, Rifki, Risman, Ikhsan, Tommy, Leandra, Time, Wandy, dan Wira.
11. Kawan-kawan Organisasi Studi dan Aktualisasi Pancasila (ORASI), Kanda Raditya D. Setyawan, S.H., Kanda Hartono Tasir Irwanto, S.H., Kanda Nur Oktaria, S.H., Kanda Resha Siregar, S.H., Kanda Aulia Muhammad, S.H., Kanda Achsan Rumi, S.H., Kanda Ikhsan Idham, S.H., Kanda Doddy Mamonto, S.H., Kanda Djaelani

Prasetya, S.H., Kanda Wildan Syaifullah, S.H., Kanda Janwar Karim, S.E., Tino, Qautzar, Nasution, Ilham, Mu'az, Ardi, Ramadhan, Akbar, Seno, Emir, Regina, Nurul, Julia, Akram, Lizda, Phyte, Salam, Wahyu Oktara, dan seluruh kawan-kawan lain yang dengan ini penulis memohon maaf jika luput disebutkan namanya satu per satu. Terima kasih telah menjadi wadah anomali yang mencerahkan dalam kehidupan pembelajaran penulis. Jaga api tetap menyala!

12. Para guru penulis, di Lentera Institute, Ayahanda Dr. Muh. Ashar, S.T., S.Sos, M.Si, Kanda Kaka, S.Psi, M.Psi., Kanda Ramli, S.E., M.E., Kanda Syawal S.H. Dan juga di Jaringan Gusdurian, Kanda Fadlan L. Nasurung.

13. Kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 90 Kecamatan Duampanua, terkhusus kawan-kawan se-posko di Desa Kaliang, Ahmad Rifai, Kanda Muhammad Taufiq, Asminar, Suci Fitriah A., dan Aditya Putri.

14. Kawan-kawan se-perjuangan di BEM Hukum Unhas dan Aliansi Unhas Bersatu (Uber), Kahar, Leoni, Fathur, Aulia, Rayhan, Ical, Thareq, Imha, Evha, Fitri, Lily, Sulasdi, Rewo, Padri, Acil, Irfan, Abi, Ahmad, Atin, Tri, Yunita, Bobby, Fais, Muhclis, Najib, Ryan, Udi, Sandy, dan kawan-kawan lain yang penulis memohon maaf jika luput dituliskan.

15. Sahabat Café Dialektika, Kak Bulla', Kak Adin, Kak Fikar, Kak Iqbal, dan Kak Niar. Terima kasih telah menjadi kawan diskusi untuk penulis.
16. Kawan-kawan Kelas Literasi, Seno, Yudi, Bakor, Dadang, Emir, Daniel, Aidil, Allink, Panji, Nita, Ara, Dillah, Ratih, Wahid, Nur Azmi, Nunu, Mamba, Annisa, Lolo, dan Thea.
17. Kawan-kawan Pasar Sabtu. Fajri, Ato, Titin, Este, Iyul, Tambo, Ndus, Wana, Kahfi, Accu, Adi Satanations, Adi Thanks, Amar, Awan, Wali, Om Sofyan, Bang Jek, Shendy, Ian, Eric, Imam Olloso, Fikar, Kabon, Gilang, Aan, Viny, Ale', Steve, Dean, Hidhana, Arif, Munif, dan Ivan.
18. Kawan-kawan Mawar Berduri. Amanda Cornelia, S.H., Muh. Rinaldy Kasim, S.H., Fharuq Fahrezha, S.H., Alfa Fatansyah, S.H., Santiago Pawe, S.H., dan Arya Batara, S.H.
19. Kawan-kawan Lapak Kamisan, Sholeh, Ibnu, Kaswadi, Owen, dan Aldi.
20. Kawan-kawan HLSC, terkhusus kawan HLSC 2012, kakanda senior HLSC, serta adinda HLSC. Terima kasih telah menjadi wadah pembelajaran yang baik selama berorganisasi.
21. Cece, Hj. Sanni, Mace Rudolf, Bude, Hj. Sama, Pak Bahar, Hj. Kartini, Ayu, Adi, Kak Rais, Kak Tarsi, dan Pak Baso.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima secara penuh oleh khalayak umum terhadap karya ini.

Makassar, 17 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Teori-Teori Perubahan Hukum	13
B. Pengertian Prinsip Legitimasi	16
1. Validitas Norma Sebagai Dasar Legitimasi	16
2. Pengertian Prinsip Legitimasi	18
C. Revolusi	20
1. Revolusi dalam Terminologi Hukum	20
2. Revolusi dalam Berbagai Pengertian	20
3. Revolusi, Reformasi, dan Evolusi	26
D. Hukum Penjajahan Jepang	28
E. Hukum Nasional Indonesia	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Tipe Penelitian	33
B. Pendekatan	33
C. Data dan Bahan	35
D. Pengumpulan Data	39
E. Pengolahan Data	39
F. Analisis Data	40
BAB IV PEMBAHASAN	41
A. Sejarah Hukum Kolonial	41
1. Periode Pertama (1840-1890).....	45

2. Periode Kedua (1890-1940)	51
3. Periode Ketiga (1940-1945)	64
B. Peralihan Tatahan Hukum Kolonial Menuju Hukum Nasional	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	80
LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Auguste Comte¹ (1798-1857) dalam bukunya *Course de Philosophie Positive* menjelaskan tentang apa yang disebutnya sebagai *the law of three stages* atau hukum tiga tahap. Comte menjelaskan bagaimana sejarah manusia dan jiwa manusia, baik secara individual maupun keseluruhan kedalam tahap teologi atau fiktif, metafisika atau abstrak, dan positif atau riil.

Pada tahap teologi, ilmu dianggap sebagai penjabaran dari ajaran agama. Dalam tahap ini pula, Comte membaginya kedalam tiga sub-bagian. Mulai dari yang paling primitif yaitu fetisisme atau animisme, dimana manusia menganggap objek-objek fisik itu memiliki jiwa. Berikutnya politeisme, dimana kekuatan alam itu dimanifestasikan dalam rupa dewa-dewa. Dan yang terakhir adalah monoteisme, dimana dewa-dewa dipadukan menjadi kekuatan adimanusiawi yang disebut Allah.²

Pada tahap metafisika, yaitu keraguan mengenai eksistensi objek yang ditelaah. Kekuatan adimanusiawi dalam tahap sebelumnya kemudian

¹ Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 15

² Ibid.

diubah menjadi abstraksi-abstraksi metafisis dimana konsep-konsep abstrak mengenai alam dipandang sebagai suatu keseluruhan.

Sampai pada tahap dimana ilmu haruslah terukur dan tidak boleh melampaui fakta. Inilah yang disebut tahap positivisme. Comte juga menjelaskan bahwa selain terukur dan tak melampaui fakta, ilmu juga haruslah memiliki nilai guna dalam tataran kehidupan manusia. Tahap ini menolak semua konstruksi hipotesis yang ada dalam filsafat dan membatasi diri pada observasi empiris dan hubungan di antara fakta melalui metode yang digunakan dalam ilmu-ilmu alamiah.³

Positivisme kemudian berkembang dan mempengaruhi bidang ilmu ekonomi, psikologi, dan lainnya termasuk hukum. Kegagalan hukum alam (*natural law*) dalam menyediakan metode untuk menetapkan apa yang menjadi kodrat manusia, menjadi kritik positivisme terhadap hukum alam. Setiap filosof mempunyai pandangan sendiri terhadap moral, keadilan, nilai, dan seterusnya. Sehingga kaum positivisme menganggap bahwa hukum alam gagal dalam memberikan pandangan hukum yang objektif.

Positivisasi hukum kemudian dilakukan sebagai upaya dalam mewujudkan tata hukum (*rechtordee*) yang memuat norma-norma yang

³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 4

bebas dari sistem moralitas dan norma sejenis lainnya sehingga dapat terwujud suatu tata hukum yang objektif.

Konsep validitas norma kemudian muncul sebagai dasar dalam penyusunan norma-norma yang akan dipositivisasikan. Validitas suatu norma tidak dapat dibatalkan karena dasar tidak sesuai dengan nilai moral atau politik. Validitas norma lahir berdasarkan aturan yang mengatur bahwa suatu norma dianggap valid. Begitupun ketika norma tersebut dibatalkan, haruslah sesuai dengan aturan yang mengatur pembatalan atau penghapusan validitas suatu norma.

Validitas norma hukum mungkin terbatas waktunya, dan adalah penting untuk memperhatikan bahwa akhir sebagaimana awal validitas ini ditentukan hanya oleh tata aturan dimana norma tersebut ada atau tervalidasi. Norma tetap valid sepanjang belum dinyatakan invalid dengan cara yang ditentukan oleh tata hukum itu sendiri. Inilah yang disebut sebagai prinsip legitimasi.⁴

Dalam membentuk tatanan hukum, ada syarat yang harus dipenuhi sehingga tatanan tersebut memperoleh validitasnya. Syarat tersebut adalah adanya kedaulatan, yaitu kekuasaan yang tertinggi, absolut, dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya, yang dapat

⁴ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2014, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 88

mengatur warga negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu negara, dan mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang, menerapkan dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya.⁵

Konsep kedaulatan memiliki keterkaitan yang erat dengan positivisme dimana kedaulatan adalah bentuk pengakuan terhadap unifikasi norma kedalam sistem yuridis yang menjadi inti positivisme. Dalam beberapa literatur tokoh positivisme, kedaulatan selalu menjadi salah satu topik bahasan seperti oleh John Austin, H.L.A. Hart, dan Hans Kelsen.

Salah satu teori umum tentang kedaulatan yang juga sering menjadi pembahasan adalah asumsi terhadap eksistensi pemangku kedaulatan. Asumsi kedaulatan ini memiliki dasar yang sangat fundamental dalam hukum. Pemangku kedaulatan ini biasa juga disebut sebagai pejabat, baik formal dan informal, baik tingkat nasional maupun lokal. Para pemangku kedaulatan inilah yang kemudian akan merancang, membuat, menemukan, menafsirkan, menerapkan, dan menegakkan hukum dimana ia memperoleh kedaulatannya.

⁵ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 91

Dalam suatu tatanan hukum yang berkedaulatan, juga terdapat suatu konsepsi yang hadir dalam pelaksanaannya yakni konsep perintah. Seperti yang dikemukakan oleh John Austin dimana perintah yang dibuat dan diberikan oleh pribadi-pribadi atau badan tertentu, ada yang disebut hukum yang dipersenjatai sanksi-sanksi dan dengan membebankan tugas-tugas tertentu, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, maka perintah oleh seorang pemangku otoritas, selama perintah tersebut sah secara hukum dan dilakukan sesuai dengan dan tidak melampaui kewenangannya yang diberikan oleh hukum, kemudian disebut sebagai “perintah hukum” maka perintah tersebut wajib dijalankan dan bagi yang mengabaikannya dapat dikenakan sanksi hukum. Bahkan setidaknya, menurut paham positivisme hukum, meskipun perintah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keinginan atau kenyataan objektif dari masyarakat, perintah tersebut secara hukum tetap harus dijalankan selama masih memiliki dasar hukum positif.⁶

Dalam perspektif hukum, secara garis besar negara memiliki dua tipe. Tipe yang pertama adalah negara polisi atau *polizei staat* atau biasa juga dikenal dengan sebutan negara penjaga malam, dimana negara memiliki tugas dalam mengamankan dan memakmurkan. Pada tipe negara ini, sistem pemerintahannya adalah monarki absolut. Asas utama negara ini adalah

⁶ *Ibid.*, hlm. 96

sallus publica supreme lex (kepentingan umum sebagai sesuatu yang harus diutamakan).⁷

Namun konsep negara polisi ini kemudian menuai reaksi. Berdasarkan dua fungsi negara polisi yakni keamanan dan kemakmuran atau ekonomi, maka ada syarat yang harus dimiliki dalam tipe negara polisi jika ingin teraplikasikan dengan baik. Syarat tersebut adalah terkondisinya penyelenggara yang baik dimana pelaksanaan fungsinya berdasarkan hukum dan kepentingan masyarakat.

Reaksi atas kritik negara polisi tersebut kemudian melahirkan negara hukum. Semangat atau prinsip utama negara hukum adalah terciptanya supremasi hukum dimana tidak ada lagi hal lain yang dapat mengatur selain hukum, sebagaimana kritik terhadap negara kekuasaan yang menjadikan kekuasaan sebagai aturan absolut. Negara hukum kemudian dalam arus *mainstream* melahirkan dua tipe yaitu negara hukum formal dan negara hukum materil.

Sebelum membahas kedua tipe tersebut, perlu dipahami terlebih dulu bahwa perbedaan mendasar antara negara polisi dan negara hukum adalah peletakan hukum tertinggi. Jika pada negara polisi berada pada pemimpin monarki seperti raja dan bangsawan, maka negara hukum terletak pada

⁷ Romi Librayanto, 2012, *Ilmu Negara*, Makassar, Pustaka Refleksi, hlm. 152-153

tatanan hukum dimana pemimpin atau penguasa juga tunduk pada hukum tersebut. Inilah yang kemudian teradaptasi ke terma *machstaat* (negara kekuasaan) dan *rechtstaat* (negara hukum).⁸

Negara hukum formil juga identik dengan negara *Anglo Saxon* dimana negara hanya mengatur hal-hal yang bersifat keamanan, sehingga persoalan kemakmuran atau ekonomi diberikan pada mekanisme pasar yang berasaskan persaingan bebas atau "*laisse faire, laissez passer*" (siapa yang kuat, dia yang menang). Dalam terminologi Immanuel Kant, negara hukum jenis ini ia sebut sebagai negara hukum liberal.⁹

Dalam perjalanannya, negara hukum formal justru menciptakan kesenjangan sosial yang luar biasa khususnya dalam hal ekonomi. Gagasan negara hukum formal dimana pemerintah dilarang turut campur dalam kegiatan masyarakat, harus begeser ke paham baru, bahwa pemerintah justru harus bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya sehingga harus turut campur dalam kegiatan masyarakat, dan tidak boleh bersikap pasif.¹⁰

Negara sebagai suatu institusi sosial juga memiliki hubungan dengan hukum sebagaimana konsep *Ubi Societa Ibi Ius*¹¹ yang dijelaskan oleh

⁸ Liat bagian penjelasan UUD 1945 tentang perbedaan negara hukum dan negara kekuasaan.

⁹ Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 5

¹⁰ Mahfud M.D., 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media, hlm. 130

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 41

Cicero. Teori ini berarti bahwa masyarakat dan fenomena-fenomena sosialnya adalah *causa* terhadap eksistensi hukum di dalamnya. Satjipto Rahardjo juga menjelaskan bahwa hukum itu merupakan bagian dari perangkat sistem kerja sosial. Yang berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib.¹²

Dalam catatan perjalanan sejarah, beberapa negara telah melalui suatu fenomena sosial dimana terjadi perubahan secara radikal, fundamen, dan cepat yang disebut sebagai revolusi. Rusia dengan revolusi Bolshevik, Inggris dengan revolusi industrinya, Iran dengan revolusi Islam, dan negara-negara lainnya seperti Perancis, Amerika, dan Indonesia adalah sederet contoh fenomena revolusi tersebut.

Dalam fenomena revolusi, ideologi gerakan, wilayah revolusi, penokohan, strategi politik sosial kebudayaan adalah beberapa aspek dari sekian teori revolusi yang tak ada satupun penafsiran tunggal atas revolusi yang dapat diterima secara objektif.

Jika mengacu pada terminologi hukum, maka revolusi-setidaknya hingga saat ini, bukanlah menjadi bagian dari perbendaharaan kosakata ilmu hukum karena umumnya kata revolusi merupakan terma dalam ilmu sosial

¹² Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, hlm. 45

dan politik. Meskipun dalam beberapa doktrin pemikir hukum, terdapat pula penggunaan kata revolusi namun tidak diuraikan secara serius seperti apakah revolusi baik dalam konsepsi yang utuh maupun praksis, seperti Hans Kelsen.

Hans Kelsen dalam *general theory of law* mengatakan, suatu revolusi terjadi ketika suatu komunitas diiadakan (*nullified*) dan diganti dengan suatu tata aturan baru dengan cara yang tidak dapat dilegitimasi dengan tata aturan yang digantikan tersebut.¹³ Dalam pengertiannya, Kelsen tidak menjelaskan keterkaitan revolusi dengan anasir non-hukum seperti ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Ini bisa dipahami berdasarkan *grand theory* Kelsen yakni *the pure theory of law* (teori hukum murni), dimana ia secara tegas memisahkan relasi antara hukum dan anasir non-hukum. Kelsen juga menambahkan bahwa revolusi baginya tidak akan berbicara bagaimana revolusi itu terjadi, apakah berdarah atau tidak.

Sebagai sebuah negara yang memiliki latar belakang sejarah perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme yang panjang, Indonesia pernah melalui fase revolusi-dalam pandangan sosial. Sejak pendudukan VOC, Belanda, dan Jepang yang berlangsung lebih dari 300 tahun, Indonesia telah melalui beberapa jenis tatanan hukum yang berlaku. Mulai dari masa dimana berlakunya hukum *Vereenigde Oost Indische Compagnie* atau VOC

¹³ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Op.Cit.* hlm. 92

(1602-1799), *Besluiten Regerings* (1814-1855), *Regerings Reglement* (1855-1926), *Indische Staatsregeling* (1926-1942), hingga pemberlakuan hukum Jepang atau disebut hukum *Osamu Seirei* (1942-1945) sebelum sampai pada berlakunya hukum nasional beserta dinamikanya sejak 1945 hingga sekarang.¹⁴

Dinamika tersebut dimulai dengan ditandainya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang diucapkan di muka umum tersebut adalah suatu pernyataan *de jure* kepada seluruh dunia bahwa di seluruh kepulauan Indonesia dalam tangan rakyat dan republik, serta bermulalah kekuasaan *de facto* kekuasaan negara menjadi bulat dan lengkap di segenap kepulauan Indonesia. Berdasarkan Proklamasi kemerdekaan terbentuklah Negara Republik Indonesia 1945.¹⁵

Keesokan harinya tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD NRI sebagai konstitusi negara yang didasarkan pada hasil sidang BPUPK yang kedua (tanggal 10 sampai 17 Juli 1945). Dimasukkannya pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara

¹⁴ Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok, RajaGrafindo, hlm. 6

¹⁵ Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 24-25

hukum” kemudian menegaskan bahwa *founding fathers* mengidealkan Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtstaat/The Rule of Law*).¹⁶

Berdasarkan khazanah literatur bacaan penulis, belum ada literatur hukum atau pun sejarah yang membahas tentang hukum yang berlaku pada masa revolusi tanggal 17 Agustus 1945. Praktis hanya membahas pemberlakuan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dimana jelas tercantum pada aturan peralihan pasal I dan II yang menjelaskan pemberlakuan seluruh hukum yang telah ada sebelumnya selama belum ada perubahan yang dilakukan pemerintahan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah perubahan tatanan hukum kolonial hingga tatanan hukum nasional Indonesia tahun 1945 adalah perubahan tatanan hukum yang terjadi secara revolusioner dalam pandangan hukum?
2. Bagaimanakah tatanan hukum nasional yang berlaku pada masa kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan setelah disahkannya UUD pada tanggal 18 Agustus 1945?

¹⁶ Alwi Wahyudi, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia : Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 63-64

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengidentifikasi Revolusi Indonesia tahun 1945 yang mengakhiri pendudukan Jepang di Indonesia dan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebuah revolusi dalam pandangan hukum.
2. Mengetahui proses revolusi hukum yang terjadi di Indonesia pada tahun 1945.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pengujian konseptual terhadap prinsip legitimasi khususnya dalam kasus revolusi Indonesia tahun 1945. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber literasi rujukan bagi para akademisi yang ingin memahami revolusi Indonesia tahun 1945 dalam perspektif hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasanah intelektual bangsa Indonesia dalam ilmu hukum, demi tercapainya negara hukum yang dapat menyentuh ranah idealitas sebagaimana yang tercita-citakan dalam falsafah negara kita, Pancasila.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori-Teori Perubahan Hukum

Sebelum jauh memaparkan beberapa teori tentang perubahan hukum-perubahan hukum yang dimaksud disini adalah perubahan tatanan hukum yang diatur dalam konstitusi negara-, penting kiranya penulis juga menyajikan beberapa hal yang mendasari mengapa sebuah konstitusi harus diubah.

Penyebab utama mengapa sebuah konstitusi harus mengalami perubahan tentu saja karena konstitusi itu dianggap sudah ditinggalkan zamannya, sudah tak sesuai lagi dengan kebutuhan rakyat yang membuatnya. Dengan mengubah konstitusi, diharapkan konstitusi itu akan memenuhi hasrat, kehendak, dan cita-cita dari rakyat, bangsa, dan negara yang memiliki konstitusi itu. Perubahan konstitusi, dimungkinkan:¹⁷

- a. Karena perjalanan waktu, hasil perjuangan politik suatu bangsa belum terwadahi. Sebagai contoh, hasil perjuangan politik untuk memerdekakan bangsa dari penjajah sudah tertampung, tetapi hasil perjuangan politik untuk mengisi kemerdekaan, belum.
- b. Biasanya, perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa bakal menuju kesempurnaan, dibanding saat konstitusi itu lahir. Lembaga-lembaga negara yang tadinya belum dianggap penting keberadaannya, pada suatu saat terasa amat

¹⁷ Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2009, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, Jakarta, PT. Grafutri Budi Utami, hlm. 53-54.

mendesak untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara.

- c. Perjalanan waktu juga mengakibatkan regenerasi tokoh-tokoh bangsa. Pandangan-pandangan mereka wajar apabila berbeda dengan pandangan tokoh-tokoh sebelumnya, katakanlah *the founding fathers* atau *the fathers of constitution*, karena permasalahan yang mereka hadapi berbeda pula. Tidak mengherankan apabila konstitusi akan mengalami perubahan pula sejalan dengan perubahan pandangan tokoh tersebut.
- d. Sejalan dengan perkembangan zaman, cita-cita bangsa pun dapat berbuah dan berkembang. Manakala perubahan cita-cita itu terjadi, timbullah kehendak untuk mencantumkaninya dalam konstitusi.

C.F. Strong¹⁸ membagi empat cara dalam melakukan perubahan konstitusi sebagai berikut: (1) *by the ordinary legislature but under certain restrictions* yakni melakukan perubahan melalui badan legislatif namun terdapat batasan dalamnya yang diatur oleh konstitusi itu sendiri, (2) *by the people through a referendum* yakni perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui referendum atas usul lembaga negara yang ada, (3) *by majority of all the units of a federal state* yakni perubahan konstitusi yang dilakukan oleh mayoritas negara bagian-dalam hal ini berlaku pada negara federal-, dan (4) *by a special convention* yakni perubahan yang dilakukan melalui konvensi-konvensi ketatanegaraan tertentu.

¹⁸ C.F. Strong, 1966, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick & Jackson, hlm. 153

Namun pada dasarnya, perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui tiga cara yakni,¹⁹ secara konstitusional, melalui konvensi, dan upaya revolusioner. Perubahan yang dilakukan secara konstitusional berarti konstitusi tersebut diubah melalui cara yang juga ditetapkan dalam konstitusi tersebut. Perubahan melalui konvensi berarti, perubahan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak terdapat dalam konstitusi. Perubahan ini dimungkinkan melalui kebiasaan ketatanegaraan. Sementara perubahan konstitusi yang dilakukan secara revolusioner adalah perubahan yang juga dilakukan diluar ketentuan konstitusi yang ada maupun kebiasaan ketatanegaraan. Perubahan ini biasanya terjadi berdasarkan kekuatan politik yang ada seperti pada kasus *Coup d'Etat*²⁰.

Sementara Jimly Asshiddiqie²¹ secara sederhana membagi adanya dua cara dalam proses perubahan konstitusi. Yang pertama adalah perubahan yang dilakukan menurut prosedur yang ditentukan dalam konstitusi, dan yang kedua adalah melalui proses yang tidak ditentukan dalam konstitusi. Cara yang pertama juga biasa dikenal dengan istilah *verfassung anderung*, sedangkan yang kedua biasa dikenal dengan istilah *verfassung wandlung*. Cara yang pertama disebut sebagai cara

¹⁹ Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 54-55.

²⁰ *Coup d'Etat* secara etimologi berasal dari bahasa Perancis yang berarti kudeta. Dalam beberapa literatur, istilah ini juga kerap diidentikkan dengan istilah revolusi.

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm.97.

konstitusional, sedangkan yang kedua disebut cara yang bersifat revolusioner.

Perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui perubahan naskah, penambahan naskah, dan pembaharuan naskah. Perubahan naskah hanya mengganti hal-hal tertentu dalam konstitusi yang bersifat parsial. Penambahan naskah terjadi melalui *addendum*, yakni penambahan naskah yang dilekatkan atau dilampirkan pada naskah asli. Cara ini tidak mengubah naskah asli, sehingga dianggap tetap berlaku. Pembaharuan naskah adalah perubahan yang bersifat mendasar. Naskah yang lama sepenuhnya diganti dengan naskah yang baru, sehingga pada gilirannya akan melahirkan suatu konstitusi baru karena yang terjadi adalah *renewal*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jenis Perubahan Hukum	Indikator
Konstitusional	<ul style="list-style-type: none">• Dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam konstitusi.
Konvensional	<ul style="list-style-type: none">• Tidak dilakukan berdasarkan konstitusi dikarenakan kekosongan

	<p>hukum yang mengatur perubahan hukum, namun dilakukan melalui kebiasaan ketatanegaraan seperti badan eksekutif atau lembaga tertinggi negara.</p>
Revolusioner	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan yang dilakukan tidak secara konstitusional maupun konvensional. Perubahan ini dimungkinkan terjadi pada peristiwa yang menyangkut kekuatan politik, seperti <i>Coup de'Etat</i>. • Merubah tatanan hukum yang lama ke yang baru secara mendasar.

B. Prinsip Legitimasi

1. Validitas Norma sebagai Dasar Legitimasi

Sistem norma yang disebut sebagai tata hukum adalah suatu sistem dinamis. Validitas norma hukum tidak karena norma dasar memilikinya dan memiliki kekuatan mengikat dengan sendirinya. Validitas norma hukum tidak dapat dipertanyakan atas dasar isinya tidak sesuai

dengan beberapa nilai moral atau politik. Suatu norma adalah norma hukum yang valid oleh nilai fakta bahwa norma tersebut dibuat sesuai dengan aturan tertentu.²²

Norma dasar suatu tata aturan hukum dipostulasikan sebagai aturan akhir tentang penetapan dan pembatalan (menerima dan kehilangan validitasnya) norma dalam tata aturan hukum tersebut. Hukum adalah selalu hukum positif, dan positivisasi tersebut berdasarkan pada fakta bahwa hukum tersebut dibuat dan dibatalkan dengan tindakan manusia yang bebas dari sistem moralitas dan norma sejenis lainnya. Hal ini membedakan antara hukum positif dengan hukum alam yang dideduksikan dari norma dasar tidak nyata yang dianggap sebagai ekspresi dari kehendak alam dan rasio alam. Norma dasar tata aturan hukum positif adalah semata-mata aturan fundamental dimana diatur pembuatan berbagai macam norma. Inilah titik awal proses pembuatan hukum dan secara keseluruhan memiliki karakter dinamis. Apapun isi dari suatu norma, dan apapun perbuatan manusia yang memungkinkan untuk menjadi isi suatu norma, dapat memperoleh validitasnya. Suatu norma adalah valid dan mengikat hanya berdasarkan persyaratan bahwa telah

²² Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Op.Cit.* hlm. 88

dibuat dalam bentuk tertentu dan lahir dengan prosedur dan aturan tertentu.²³

2. Pengertian Prinsip Legitimasi

Validitas norma hukum mungkin terbatas waktunya, dan adalah penting untuk memperhatikan bahwa akhir sebagaimana awal validitas ini ditentukan hanya oleh aturan dimana norma tersebut ada. Norma tetap valid sepanjang belum dinyatakan invalid dengan cara yang ditentukan oleh tata hukum itu sendiri. Inilah prinsip legitimasi. Prinsip legitimasi ini tidak berlaku pada kasus revolusi atau juga disebut dengan *coup d'Etat*. Suatu revolusi terjadi ketika tata hukum suatu komunitas ditiadakan (*nullified*) dan diganti dengan suatu tata aturan baru dengan cara yang tidak dapat dilegitimasi dengan tata aturan yang digantikan tersebut.²⁴

Secara hukum adalah tidak relevan apakah revolusi itu berdarah atau tidak, atau dilakukan oleh massa atau elit pemerintahan. Dalam pandangan hukum, kriteria utama suatu revolusi adalah bahwa tata aturan yang berlaku disingkirkan dan digantikan dengan tata aturan baru dengan cara yang tidak diatur dalam tata aturan pertama.²⁵

²³ *Ibid.*, hlm. 88-89

²⁴ *Ibid.*, hlm. 92

²⁵ *Ibid.*

Biasanya, orang yang berhasil melakukan revolusi hanya meniadakan konstitusi dan hukum tertentu yang memiliki signifikansi besar secara politik dan menggantinya dengan norma lain. Sedangkan sebagian besar bagian dari tata hukum lama *tetap valid* dalam bingkai tata aturan yang baru. Namun sesungguhnya yang tetap sama hanyalah isi dari norma-norma tersebut, bukan alasan validitasnya. Norma-norma tersebut tidak lagi valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh konstitusi lama, tetapi karena validitasnya diberikan baik secara jelas maupun diam-diam oleh konstitusi yang baru. Fenomena ini disebut resepsi (*reception*) dimana tata aturan yang baru menerima atau mengadopsi norma dari tata aturan lama. Hal ini berarti tata aturan baru memberikan validitas terhadap tata norma yang isinya merupakan norma dari tata aturan lama.²⁶ Resepsi adalah prosedur pembuatan hukum yang diperluas.

Karena validitasnya diperoleh dari tata aturan baru, maka revolusi dikatakan tidak hanya merubah konstitusi, tetapi seluruh tata hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tata aturan lama telah dihilangkan validitasnya dan tidak lagi sesuai dengan prinsip legitimasi. Hal ini berlaku baik secara *de facto* maupun *de jure*. Setiap ahli hukum akan mengasumsikan bahwa tata aturan lama telah kehilangan validitasnya, dan semua norma yang

²⁶ *Ibid.*

valid dalam tata aturan baru menerima validitasnya secara eksklusif dari konstitusi baru.²⁷

C. Revolusi

1. Revolusi dalam Terminologi Hukum

Dalam pengamatan penulis, sangat minim para ahli hukum yang menjelaskan apa itu revolusi khususnya dalam terminologi disiplin ilmu hukum. Sementara dalam disiplin ilmu lain ada banyak literatur keilmuan khususnya sosiologi, politik, dan ekonomi yang membahas revolusi secara luas dan mendalam melalui karyanya seperti oleh Karl Marx, Lenin, Leon Trotsky, Imam Khomenei, Tan Malaka dan Soekarno.

Telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan prinsip legitimasi bahwa revolusi dalam artian hukum tidak berbicara tentang bagaimana revolusi terjadi, apakah berdarah atau tidak, dilakukan oleh massa atau elit pemerintahan. Dalam pandangan hukum, Hans Kelsen menilai kriteria utama suatu revolusi adalah bahwa tata aturan yang berlaku disingkirkan dan digantikan dengan tata aturan baru dengan cara yang tidak diatur dalam tata aturan pertama.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hlm. 93

²⁸ Liat kembali pada penjelasan pengertian prinsip legitimasi yang membahas revolusi.

2. Revolusi dalam Berbagai Pengertian

Berbagai teori tentang revolusi telah dikemukakan oleh ilmu politik . pendapat yang paling umum adalah bahwa revolusi merupakan peralihan kekuasaan (*transfer of power*) dengan atau tanpa kekerasan²⁹. Kata revolusi muncul dalam pengertian yang umum pada abad keempat belas. Secara umum, revolusi artinya gerakan berputar, gerakan sirkular. Nicolaus Copernicus menggunakan kata revolusi untuk menggambarkan gerakan benda-benda langit. Bukunya yang terkenal, *On the Revolutions of Celestial Bodies*. Pada abad ketujuh belas istilah astronomi ini diambil dan dipergunakan dalam filsafat politik. Revolusi diartikan sebagai pergantian dan perputaran elite kekuasaan pada negara baru. Pada abad kedelapan belas, dengan munculnya Revolusi Perancis (1789), kata revolusi mengandung makna sebagai terobosan historis, yang membentuk masyarakat baru. Abad kesembilan belas adalah abad keemasan dari ide revolusi. Karl Marx mempopulerkan revolusi sebagai tahapan sejarah yang niscaya harus dijalani dalam perkembangan masyarakat. Dan abad kedua puluh adalah "the age of revolutions". Pada permulaan abad ini ada revolusi Komunis di Rusia (1917), Kuba (1959), dan perjuangan kemerdekaan negara-negara bekas jajahan. Akhir abad

²⁹ R.Z. Leirissa, *Charles Tilly dan Studi tentang Revolusi*, Jurnal Sejarah, 6:1, Pekanbaru, hlm. 12

ini, kita menyaksikan Revolusi Islam di Iran (1979), Pilipina (1985), negara-negara Eropa Timur (1989).³⁰

Dalam benak orang awam, revolusi sering menjadi impian indah. Revolusi dipandang sebagai juru selamat umat manusia. Revolusi menjadi pintu gerbang emas yang mengantarkan bangsa yang menderita dan tertindas ke *Paradies der Zukunft*, surga di masa depan. Dalam revolusi memang ada tumpahan darah; tetapi itulah darah yang akan menyuburkan tanah air dan menumbuhkan bunga-bunga kemakmuran. Gerakan-gerakan sosial yang radikal, bahkan banyak sekte keagamaan mendasarkan ideologinya pada mitos revolusi seperti itu. Mitos seperti inilah yang pernah dikembangkan secara “akademis” pada abad kesembilan belas.³¹

Pada abad kedua puluh, abad revolusi, mitos ini tumbang. Pengalaman revolusi yang sebenarnya jauh dari apa yang diimpikan. Revolusi tidak menjanjikan kemajuan melainkan krisis. Revolusi tidak menegakkan keadilan dan kemakmuran, tetapi justru melahirkan ketidakadilan, penindasan, kesengsaraan, dan penderitaan yang berkepanjangan. Revolusi menyingkirkan seorang tiran dan menghadirkan ribuan tiran sebagai penggantinya. Dalam pikiran Marxian,

³⁰ Jalaluddin Rakhmat, 1999, *Rekayasa Sosial : Reformasi atau Revolusi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm. 184

³¹ *Ibid.*

revolusi adalah pembuka zaman baru dengan rasio sebagai *Leitmotif*³². Dalam kenyataannya, revolusi seringkali menggantikan rasio dengan kekerasan, pemaksaan dan penghancuran yang tidak rasional. Alih-alih sebagai juru selamat, revolusi telah menjadi sejenis kiamat.³³

Tumbangnya mitos revolusi dilaporkan Walter Laqueur dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*: “Revolusi yang modern biasanya dilakukan, menurut pemimpinnya, atas nama kekuatan rakyat untuk menumbangkan despotisme, korupsi, dan tatanan sosial politik yang sudah rusak, dengan membawa bendera kemajuan, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Tetapi gerakan sosial harus dinilai bukan hanya dari maksud, deklarasi ideologis dan janji-janjinya, tetapi juga dari kinerja mereka yang sebenarnya. Kebanyakan yang melakukan tindakan revolusioner untuk kemerdekaan dan keadilan sosial hanyalah demagog atau penipu; sisanya adalah orang-orang yang dengan tulus meyakini cita-citanya. Tetapi sebagai akibat tindakan mereka, telah timbul keadaan yang betul-betul menafikan keyakinannya itu”.³⁴

Apa yang baru saja kita bicarakan adalah makna revolusi dalam wacana orang kebanyakan; revolusi seperti yang dipahami dalam diskusi kita sehari-hari. Memang, revolusi seperti banyak konsep sosial

³² *Letmotif* dalam terminologi Marxian adalah panduan yang digunakan dalam menjalankan revolusi. Panduan yang dimaksud oleh Marxian ini adalah rasio.

³³ *Ibid.*, hlm. 186

³⁴ *Ibid.*, hlm. 187

dibicarakan dalam dua wacana: wacana sosietaI (*societal discourse*) dan wacana sosiologis. Wacana pertama kita sebut saja “mitos revolusi” dan wacana kedua “teori revolusi”. Diantara dua wacana itu ada hubungannya, ada kaitannya, ada saling pengaruh. Teori-teori revolusi dirumuskan dari mitos revolusi. Bukankah kebanyakan teori sosial hanyalah *common sense made difficult*? Teori revolusi mensistematikan, menjelaskan, merumuskan apa yang sudah dipikirkan orang tentang revolusi. Setelah itu, teori revolusi kemudian dikembangkan, digabungkan dengan teori-teori lainnya, diletakkan dalam *grand theory*. Sesudah diverifikasi, teori itu akhirnya mempengaruhi mitos revolusi. Teori Marx tentang revolusi akhirnya menjadi ideologi bagi jutaan orang yang menginginkan revolusi.³⁵

Sementara Tan Malaka memberi pemaknaan bahwa revolusi itu hadir secara konsekuen dan tak terhindarkan dimana jika terjadi pertentangan kelas yang kian hari kian tajam, maka hanya menunggu aktu revolusi itu akan meletus.³⁶

Sebelum lebih lanjut membicarakan teori revolusi dalam wacana sosiologis, kita akan mencoba melihat lagi makna revolusi dalam pengertiannya yang modern. Dalam pengertiannya yang modern, revolusi

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Tan Malaka, 2013, *Aksi Massa*, Yogyakarta, NARASI, hlm.15

mula-mula digunakan di negara-kotanya Italia pada akhir abad pertengahan. Cromwell memasukkannya dalam bahasa Inggris dengan arti –rada aneh- mengembalikan orde lama, *restoring the old order*. Dalam wacana akademis, definisi revolusi dapat dilacak pada dua tradisi intelektual: historiosotis dan sosiologis.³⁷

Dalam tradisi yang pertama, filsafat sejarah, revolusi dipahami sebagai letupan radikal, terobosan yang tiba-tiba dan penuh kekerasan, *cataclysmic break* dalam perjalanan sejarah. Pada pemikiran lima tahap pembentukan sosio-ekonomis Marx, masyarakat berkembang dari masyarakat primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, sampai ke komunisme. Masyarakat primitif adalah masyarakat sebelum kelas (*pre-class*). Perbudakan, feodalisme, dan kapitalisme adalah masyarakat dengan kelas yang dipenuhi alienasi. Komunisme adalah masyarakat tanpa kelas dan tidak ada alienasi. Dari masyarakat teralienasi ke masyarakat alienasi diperlukan sebuah ambang sejarah, *historical threshold*; inilah revolusi. Secara singkat revolusi sosial adalah loncatan kualitatif menuju tingkat perkembangan sosial yang lebih tinggi.³⁸

Dalam tradisi sosiologis, revolusi mengacu pada gerakan massa yang menggunakan atau mengancam menggunakan koersi dan

³⁷ Jalaluddin Rakhmat, *Op.Cit.*, hlm. 188

³⁸ *Ibid.*

kekerasan melawan penguasa untuk memaksakan perubahan yang mendasar dan berlangsung lama. Revolusi tidak lagi terjadi karena “hukum baja” sejarah seperti dalam konsep Marxian. Revolusi adalah hasil karya kreatif manusia, yang ditampakkan dalam tindakan kolektif pada titik kritis proses sejarah.³⁹

3. Revolusi, Reformasi, dan Evolusi

Pembahasan pada bagian ini tidak akan mengulas secara mendalam tentang reformasi dan evolusi, melainkan pokok perbedaan yang terdapat pada revolusi terhadap reformasi dan evolusi.

Dengan melihat dua tradisi intelektual itu, kita dapat mengelompokkan definisi revolusi pada tiga kelompok. Kelompok pertama melihat revolusi sebagai transformasi masyarakat yang fundamental dan berskala luas. Inti revolusi terletak pada keluasan dan kedalaman perubahan. Disini revolusi adalah lawan dari reformasi. Bullock dan Stallybras mendefinisikan revolusi sebagai “*sudden, radical changes in the political, social, economic structure of society*”. Fairchild menyebut revolusi sebagai “*a sweeping sudden change in the societal structure, or in some important feature of it*”. Jadi, jika revolusi menimbulkan perubahan yang meliputi semua bidang kehidupan, ipoleksosbud⁴⁰, maka

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Ipoleksosbud adalah akronim dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

reformasi hanya menyentuh sebagian bidang saja misalnya politik atau ekonomi. Jika revolusi membuat perubahan yang segera dan tiba-tiba, reformasi menimbulkan perubahan gradual dan berangsur-angsur. Perubahan karena revolusi bersifat “*sudden*” dan “*radical*”. Perubahan karena reformasi bersifat “*slow*” dan “*partial*”.⁴¹

Kelompok kedua mendefinisikan revolusi dengan titik berat pada penggunaan kekerasan dan perjuangan, serta kecepatan perubahan. Disini revolusi adalah lawan dari evolusi. Berikut adalah definisi revolusi dalam kelompok kedua :

- *Attempts to realize changes in the constitution of societies by force.*
- *Fundament sociopolitical change accomplished through violence.*
- *Drastic, sudden substitution of one group in charge of the running of a territorial political entity by another group hitherto not running the government.*
- *The seizure (or attempted seizure) of control over governmental apparatus understood as the principle concentrated means of coercion, taxation, and administration in society by one class, group, or (more likely) coalition, from another.*

Kelompok ketiga menggabungkan kedua definisi ini. Revolusi dipahami sebagai “perubahan domestik yang cepat, fundamental, dan penuh kekerasan dalam nilai-nilai dominan dan mitos masyarakat, dalam institusi politik, struktur sosial, kepemimpinan, dan kebijakan serta kegiatan pemerintahan”; “transformasi yang cepat, mendasar dari keadaan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 189

masyarakat dan struktur kelas... disertai atau sebagian dilakukan melalui pemberontakan dari bawah, berdasarkan kepentingan kelas”; “perebutan kekuasaan negara dengan cara kekerasan oleh pemimpin gerakan massa, dimana kekuasaan itu selanjutnya digunakan untuk menimbulkan perubahan proses pembaruan sosial yang besar”.

Secara singkat, revolusi ditandai dengan tiga hal. Pertama, perubahan yang fundamental, komperhensif dan multidimensional, menyentuh inti tatanan sosial. Kedua, revolusi melibatkan massa yang besar dan dimobilisasikan serta bergerak dalam gerakan revolusioner. Ketiga, selalu melibatkan kekerasan dan koersi. Untuk ciri yang ketiga, kita dapat mengajukan keberatan dari bukti-bukti sejarah. Ada revolusi, walaupun tidak banyak, yang dijalankan tanpa kekerasan : Gandhisme di India dan gerakan yang mendorong jatuhnya komunisme di sebagian negara Eropa Timur. Tetapi sebagian pengamat tidak menyebut dua contoh ini sebagai revolusi.⁴²

D. Hukum Penjajahan Jepang (*Osamu Seirei*)

Pada masa pemerintahan Jepang, pelaksanaan tata pemerintahan di Indonesia berpedoman undang-undang yang disebut “*Gunseirei*”

⁴² *Ibid.*, hlm. 191

melalui *Osamu Seirei*.⁴³ Hukum ini berlaku sejak tahun 1942 sampai tahun 1945 pada tahun kemerdekaan Indonesia.

Osamu Seirei ini mengatur segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintahan, melalui peraturan pelaksana yang disebut "*Osamu Kanrei*". Pemerintahan *Osamu Seirei* berlaku secara umum. *Osamu Kanrei* sebagai peraturan pelaksana isinya juga mengatur hal-hal yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.⁴⁴

Dalam bidang hukum, pemerintahan balatentara Jepang melalui *Osama Seirei* nomor 1 tahun 1942 pada pasal 3 menyebutkan, semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 3 *Osamu Seirei* tersebut, jelaslah bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum balatentara Jepang datang ke Indonesia masih tetap berlaku. Dengan demikian, pasal 131 IS⁴⁶ sebagai pasal politik hukum dan pembagian golongan penghuni Indonesia menurut pasal 163 IS masih tetap berlaku.⁴⁷

⁴³ Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 15

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 16

⁴⁶ IS atau Indische Staatregeling adalah hukum kolonial Belanda yang berlaku sejak tahun 1926 sampai 1942 sebelum masuknya Jepang ke Indonesia.

⁴⁷ *Ibid.*

Untuk golongan Eropa, Timur Asing Cina dan Indonesia, Timur Asing bukan Cina yang tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropa tetap berlaku baginya *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek Van Koophandel* (WVK)⁴⁸ serta aturan-aturan hukum perdata Eropa yang tidak dikodifikasikan.⁴⁹

Sedangkan bagi golongan Indonesia dan golongan Timur Asing bukan Cina yang tidak tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropa tetap berlaku aturan-aturan hukum perdata adatnya. Selanjutnya pemerintah balatentara Jepang juga mengeluarkan *Gun Seirei* nomor Istimewa 1942, *Osamu Seirei* nomor 25 tahun 1944, memuat aturan-aturan pidana yang umum dan aturan-aturan pidana yang khusus, sebagai pelengkap peraturan yang telah ada sebelumnya.⁵⁰

Sedangkan *Gun Seirei* nomor 14 tahun 1942 mengatur susunan lembaga peradilan yang terdiri dari:

1. *Tihoo Hooir*, berasal dari *landraad* (Pengadilan Negeri);
2. *Keizai Hooir*, berasal dari *landgerecht* (Hakim Kepolisian);
3. *Ken Hooir*, berasal dari *Regenschap Gerecht* (Pengadilan Kabupaten);
4. *Gun Hooir*, berasal dari *Districts Gerecht* (Pengadilan Keedanan);
5. *Koikyoo Kootoo Hooir*, berasal dari *Hof Voor Islami etische Zaken* (Mahkamah Islam Tinggi);
6. *Sooyoo Hooir*, berasal dari *Priesterraad* (Rapat Agama);
7. *Gunsei Kensatu Kyoko*, terdiri dari *Tihoo Kensatu Kyoko* (Kejaksaan Pengadilan), berasal dari *Paket voor de Landraden*.

⁴⁸ *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah kitab undang-undang hukum perdata, sementara *Wetboek van Koophandel* (WVK) adalah kitab undang-undang hukum dagang.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Adapun wewenang *Raad van Justitie*⁵¹ dialihkan kepada *Tihoo Hooi* dan *Hoggerechtshof* tidak disebut-sebut dalam undang-undang itu. Semua aturan hukum dan proses peradilannya selama zaman penjajahan Jepang berlaku sampai hukum Indonesia berlaku.⁵²

E. Hukum Nasional Indonesia

Pada bagian ini, tidak akan dijelaskan bagaimana bentuk dan dinamika hukum nasional Indonesia sejak awal hingga sekarang. Melainkan hanya pada fase awal berlakunya tatanan hukum nasional Indonesia pada tahun 1945 pasca pendudukan Jepang.

Pasca pendudukan Jepang di Indonesia beserta hukumnya sejak 1942, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memperoleh kemerdekaannya yang ditandai dengan proklamasi. Beriringan dengan diperolehnya kemerdekaannya, Soekarno dan Hatta melalui proklamasi mengatribusikan pembentukan konstitusi baru Indonesia dalam rangka pemindahan kekuasaan dan tatanan hukum Indonesia. Atribusi ini dimuat dalam paragraf kedua naskah proklamasi yang berbunyi "...Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.". Pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkanlah Undang-Undang Dasar yang

⁵¹ *Raad van Justitie* adalah Dewan Kehakiman yang berlaku pada masa hukum kolonial Belanda.

⁵² *Ibid.*, hlm. 17

supel dan elastik dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. UUD ini adalah hasil rancangan dari sidang BPUPK yang kedua setelah melalui perdebatan pada sidang besar.

Bentuk tata hukum dan politik hukum yang akan berlaku masa itu dapat dilihat pada pasal I dan II aturan peralihan UUD 1945 yaitu : Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal II, semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.⁵³

Menurut ketentuan Pasal I dan II aturan peralihan itu dapat diketahui, bahwa semua peraturan dan lembaga yang telah ada dan berlaku pada zaman Belanda maupun zaman balatentara Jepang, tetap diperlakukan dan difungsikan. Dengan demikian, tata hukum yang berlaku pada masa tahun 1945-1949 adalah semua peraturan yang telah ada dan pernah berlaku pada masa penjajahan Belanda maupun pada masa Jepang berkuasa dan produk-produk peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia dari tahun 1945-1949.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan,⁵⁵ yaitu dengan meneliti berbagai literatur terkait pemikiran hukum tentang prinsip legitimasi, revolusi baik dalam pandangan hukum maupun disiplin ilmu lain, sejarah revolusi Indonesia tahun 1945 baik dalam pandangan hukum maupun disiplin ilmu lain, serta literatur lain yang dapat menunjang hasil penelitian ini.

B. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

1. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁵⁶

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 14

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 94

membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Melalui pendekatan ini, penulis akan meneliti konsep doktrinal prinsip legitimasi, dan revolusi dalam pandangan hukum dalam berbagai literatur pendukung.

2. Pendekatan historis (*historical approach*)⁵⁷

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

Melalui pendekatan ini, penulis akan meneliti sejarah revolusi Indonesia pada tahun 1945 yang menjadi masa transisi tatanan hukum di Indonesia.

⁵⁷ *Ibid.*

C. Data dan Bahan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum dan bahan pustaka:

1. Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari⁵⁸:

- i. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945;
- ii. Peraturan Dasar, mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- iii. Peraturan perundang-undangan;
- iv. Bahan hukum yang tidak ikodifikasikan, seperti hukum adat;
- v. Yurisprudensi;
- vi. Traktat;
- vii. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 13

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan norma dasar serta bahan hukum mengikat lainnya sebagai bahan hukum primer yang dapat menunjang penelitian ini.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya⁵⁹.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang memuat doktrin para pakar hukum terkait bahan hukum primer.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya⁶⁰.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan bahan hukum tersier berupa literatur yang terdapat dalam internet, dan kamus hukum serta literatur hukum tersier pendukung lainnya.

2. Bahan Pustaka

Apabila dilihat dari sudut sifat informasi yang diberikannya, maka bahan pustaka dapat dibagi dalam 2 kelompok, sebagai berikut⁶¹:

a) Bahan/sumber primer

Bahan/sumber primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan/sumber primer ini mencakup :

- i. Buku
- ii. Kertas kerja konperensi, lokakarya, seminar, simposium, dan seterusnya.
- iii. Laporan penelitian
- iv. Laporan teknis
- v. Majalah
- vi. Disertasi atau tesis
- vii. Paten

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 29

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan buku ilmiah sebagai bahan rujukan utama, serta bahan pustaka primer lain yang dapat menunjang penelitian.

b) Bahan/sumber sekunder

Bahan/sumber sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan/sumber sekunder ini antara lain :

- i. Abstrak
- ii. Indeks
- iii. Bibliografi
- iv. Penerbitan pemerintah
- v. Bahan acuan lainnya

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penerbitan pemerintah sebagai bahan rujukan utama, serta bahan pustaka sekduner lainnya yang dapat menunjang penelitian.

D. Pengumpulan Data

Penggumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur-literatur yang terdapat dalam perpustakaan serta tempat-tempat lainnya yang dianggap dapat menunjang hasil penelitian.

Selain pengumpulan data berupa literatur ilmiah hukum, peneliti juga akan melakukan penelusuran literatur disiplin ilmu lain yang dapat menunjang penelitian. Peneliti juga akan melakukan wawancara dengan beberapa ahli hukum dalam menafsirkan literatur.

E. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara :

1. Identifikasi, identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan judul penelitian.
2. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
3. Seleksi data, yaitu memeriksa secara keseluruhan data untuk menghindari kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan permasalahan

4. Klarifikasi data, pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing dan telah dianalisis agar sesuai dengan permasalahannya.
5. Penyusunan data, yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis. Kemudian sarana atau alat untuk menganalisis data yaitu menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi historis.

Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan dan menyusun suatu konsep dengan konsep lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Interpretasi historis dilakukan dengan menelusuri latar belakang sejarah yang termuat dalam literatur terkait judul penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sejarah Hukum Kolonial

Pembahasan sejarah hukum kolonial ini merupakan pemaparan fakta sejarah terhadap bentuk dan dinamika hukum yang ada pada masa terkait, yakni pada masa kolonial Belanda hingga hukum nasional Indonesia. Perubahan-perubahan hukum yang terjadi pada masa-masa tersebut tidak akan terlepas dari fakta ekonomi sosial politik yang menjadi salah satu faktor pendukung perubahannya, sehingga nantinya dalam bab ini akan turut dibahas fakta ekonomi politik yang mendasari perubahan-perubahan hukum yang terjadi.

Dalam penulisan ini, penulis akan mengadopsi pembabakan sejarah hukum kolonial menuju hukum nasional Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. Pembabakan Soetandyo terkait perubahan hukum dari masa hukum kolonial hingga pascakolonial dibagi kedalam tiga periode besar, yaitu periode 1840-1890, 1890-1940, dan 1940-1990. Namun khusus untuk periode yang terakhir, penulis hanya akan membahasnya mulai dari tahun 1940-1945. Periode terakhir ini pula akan terbagi dua pembahasan yakni dalam bingkai hukum kolonial dan peralihannya ke hukum nasional, khusus hukum nasional akan dielaborasi

dalam bagian pembahasan peralihan hukum kolonial menuju hukum nasional. Penulis dengan sengaja membatasi periode yang terakhir ini hanya hingga tahun 1945 karena penelitian ini hanya akan membahas sampai ketika masa berlakunya UUD 1945. Adapun pembahasan terkait tatanan hukum pada masa pasca kemerdekaan akan diuraikan sebagai pelengkap sejarah hukum Indonesia.

Meskipun kolonial Belanda telah menduduki Indonesia jauh sebelum pembabakan periode awal pembabakan Soetandyo, tahun 1840 khususnya hingga tahun 1860 secara sengaja dipilih sebagai tahun pembabakan awal sejarah hukum kolonial dimulai dikarenakan tahun tersebut menjadi titik akhir atas keberadaan dan pengaruh badan dagang bernama *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* atau VOC serta kebijakan eksploitasi serta monopoli usaha oleh pemerintah kolonial Belanda yang disebut *cultuurestelsel* yang selama ini menjadi sentrum dalam kehidupan ekonomi masa kolonial baik bagi orang Belanda maupun pribumi. Kebijakan-kebijakan pada masa sebelumnya dipegang sepenuhnya oleh Gubernur Jenderal yang dianggap bertindak mewakili atas nama Raja. Kedudukan Raja di negeri Belanda dan sulitnya teknologi komunikasi pada masa itu membuat kontrol raja terhadap kebijakan para Gubernur Jenderal di daerah jajahan menjadi sulit.

Masa sebelum tahun 1940 diwarnai dengan dinamika kodifikasi yang diawali teraneksasinya Belanda sebagai bagian dari imperium Perancis melalui pemberlakuan kitab hukum yang disebut *Codes Napoleon*. Dalam

kitab hukum tersebut termuat rangkaian aturan yang mengatur hukum perdata (*Codes Civil*), hukum dagang (*Codes Commerce*), dan hukum pidana (*Codes Penal*).

Segera setelah keruntuhan Napoleon, berkecambah pemikiran-pemikiran nasionalisme yang menggugat keberadaan *Codes Napoleon* sebagai bentuk kodifikasi hukum yang dianggap tidak merefleksikan orang Belanda. Tahun 1830, tersusunlah naskah kitab undang-undang yang baru, kecuali hukum pidana yang dibentuk oleh Panitia Kemper atau penitia penyusun kitab undang-undang yang baru berdasarkan perintah raja. Dan tepatnya Juli 1830, melalui Keputusan Raja (*Koninklijk Besluit*) undang-undang tersebut akan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Februari 1831. Namun pada Agustus 1830, rencana tersebut kemudian ditangguhkan karena mendapatkan protes oleh para perwakilan negara Belanda bagian Selatan⁶² yang menganggap rancangan tersebut hanya merepresentasikan orang Belanda bagian utara. Akhirnya pada tahun 1838, kitab undang-undang yang disusun oleh Panitia Kamper dapat berlaku setelah provinsi-provinsi bagian selatan memisahkan diri dari daerah kekuasaan Belanda saat itu.

Pada tanggal 1 Agustus 1839, melalui *Koninklijk Besluit* No 102, seorang pakar hukum bernama Scholten van Oud-Harleem diberikan tugas

⁶² Negara Belanda bagian selatan ini nantinya akan bersatu menjadi bagian dari negara Belgia, termasuk dalam hal kodifikasi hukumnya.

untuk menyusun rancangan kitab kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang di Hindia-Belanda. Keputusan raja ini dibuat dikarenakan sebelumnya kegagalan G.C. Hageman sebagai ketua *Hooggerechtshof* Hindia-Belanda dalam upaya penyusunan rancangan kodifikasi hukum berdasarkan instruksi raja untuk wilayah Hindia-Belanda nantinya. Mr. Scholten ini telah berhasil menyusun rancangannya setelah bekerja dalam komisi yang diketuainya selama delapan tahun.

Pada tanggal 16 Mei 1847, melalui *Koninklijk Besluit* dalam Ind. Stb. Th. 1847, No. 23 disahkan sebuah paket yang berisi kitab peraturan perundang-undangan antara lain *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en Het Beleid der Justitie* (Peraturan tentang Organisasi Badan-Badan Pengadilan dan Kebijakan Peradilan), *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (Ketentuan Umum Tentang Pembentukan Undang-Undang), *Burgerlijk Wetboek* (Hukum Perdata), *Wetboek van Koophandel* (Hukum Dagang), dan *Bepalingen Betrekkelijk De Misdrijven, Begaan ter Gelegenheid van Faillissement en bij Kennelijk Onvermogen, Mitsgaders bij Surseance van Betaling* (Hukum Acara).

Dasawarsa 1840-1850, tepatnya 1848 menandai keberlakuan undang-undang dasar (*Groundwet*) baru di negeri Belanda yang nantinya pada tahun 1854 akan menyusul pengundangan peraturan baru tentang tata pemerintahan daerah jajahan, yang pada waktu itu masih dikenal dengan sebutan Hindia-Belanda. Inilah yang nantinya akan mempengaruhi

kehidupan hukum di daerah jajahan. Pengaruh tersebut tidak terkecuali berimbas pada keleluasan peran penguasa-penguasa di daerah jajahan yang harus menghormati asas supremasi hukum.

1. Periode Pertama (1840-1890)

Berhasilnya revolusi Prancis membuat ide tentang liberalisme berkembang dengan cepat, tak terkecuali pada bidang hukum di Belanda beserta negara koloninya. Periode pertama (1840-1890), adalah periode dimana perkembangan hukum yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan liberalisme yang mencoba membuka peluang-peluang lebar pada dan untuk modal-Modal swasta dari Eropa guna ditanamkan kedalam usaha-usaha perkebunan besar di daerah jajahan, namun juga dengan maksud di lain pihak untuk tetap melindungi kepentingan desa-desa dan pertanian tradisional yang menjadi sumber kehidupan penduduk pribumi. Pemikiran liberalisme ini adalah hal yang nantinya mendasari seluruh kebijakan hukum kolonial Belanda di Indonesia. Kebijakan hukum yang digariskan secara sadar inilah yang disebut *de bewuste rechtspolitik*. Pembabakan kecil dalam periode ini penulis batasi pada periode kecil tahun 1840-1860, sementara pembabakan kecil berikutnya adalah tahun 1860-1890.

Periode kecil pertama (1840-1860) adalah periode yang menggambarkan upaya pembangunan kesadaran atas semangat pembangunan *The Rule of Law* dan supremasi hukum dalam tatanan hukum

kolonial yang sebenarnya pun adalah upaya politis dalam mengendalikan kekuasaan eksekutif di tanah jajahan oleh raja. Setelah pemberlakuan *Groundwet* 1848 dan *Regerings Reglement* 1854.⁶³ praktis sistem hukum yang baru tersebut berimbas pada keberlakuan hukum kolonial di Hindia-Belanda. Upaya pembangunan hukum tersebut disertai dengan dinamika kodifikasi dan unifikasi hukum, khususnya kebudayaan Eropa yang berupaya mempengaruhi ke dalam kehidupan pluralitas hukum di Hindia-Belanda yang telah hidup jauh sebelumnya.

Dalam RR 1854, terdapat tiga pasal yang oleh Soetandyo dalam bukunya dianggap merupakan refleksi atas ide-ide liberal revolusi Perancis. Pasal tersebut adalah pasal 79, 88, dan 89. Pasal 79 reglemen itu menyiratkan asas *trias politica* yang menghendaki diserahkannya kekuasaan peradilan ke tangan hakim yang bebas; Pasal 88 memerintahkan dilaksanakannya asas legalitas dalam setiap proses pemidanaan; Sedangkan Pasal 89 melarang pemidanaan yang menyebabkan seseorang akan kehilangan hak-hak perdatanya. Ketiga ketentuan itu dengan demikian dapatlah dipandang sebagai simbol-simbol normatif yang mengungkapkan terjadinya perlawanan terhadap praktik-praktik otokratik oleh sebuah kekuasaan eksekutif di daerah jajahan, dan kemudian daripada itu juga

⁶³ Regerings Reglement (RR) ini adalah penyederhanaan istilah dari Het Reglement op Het Beleid der Regering van Nederlandsch-Indie yang berarti peraturan tentang tata pemerintahan

memberikan kekuatan penunjang kepada kaum liberal untuk merealisasikan perubahan-perubahan yang lebih nyata dan lebih lanjut di Hindia-Belanda.⁶⁴

Perjalanan perkembangan penataan hukum yang berdasarkan nilai-nilai liberalisme baik bagi orang Belanda maupun pribumi tidaklah berjalan dengan mulus. Ide kodifikasi dan unifikasi adalah dua hal yang menjadi pokok persoalan terkait penataan hukum kolonial. Ide liberalisme banyak mempengaruhi upaya kodifikasi dalam rangka penjaminan hak baik bagi orang Belanda dan yang dipersamakan maupun orang pribumi dan yang dipersamakan. Sementara asas kesatuan atau ketunggalan hukum (*eenheidsbeginself*) menjadi dasar utama upaya dalam rangka menciptakan unifikasi hukum. Asas ketunggalan ini merupakan asas yang sangat politis karena dalam kondisi hukum yang plural, diharapkan tidak akan ada proses pengadilan yang diluar jangkauan pengawasan Gubernur Jenderal yang menjabat atas nama raja.

Pluralitas hukum yang ada di Indonesia bahkan sejak sebelum invasi kolonial Belanda di Indonesia merupakan tema besar yang harus dijawab oleh penata kodifikasi hukum. Pluralitas hukum ini juga mempengaruhi model pengadilan yang akan ditempuh.

Periode kecil kedua adalah periode yang melingkupi tahun 1860-1890. Dasawarsa-dasawarsa pada periode kecil ini merupakan periode

⁶⁴ Soetandyo Wignjosebroto, 2014, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Jakarta, Epistema Institute, hlm. 20

eksperimental yang banyak menuai polemik utamanya dalam hal unifikasi hukum yang menyinggung hukum pribumi (pada era berikutnya disebut hukum adat)⁶⁵ yang berlaku.

Gagasan unifikasi hukum kolonial yang teradaptasi dari nilai-nilai liberal memberikan perlindungan terhadap seluruh penduduk yang kemudian terkodifikasi pada pasal 75 ayat 3 RR 1854 (yang telah berkekuatan *wet*) dimana sebelumnya termuat pada pasal 9 *Algemeen Bepalingen van Wetgeving* (AB) (yang masih berkekuatan *Koninklijk Besluit*).

Pasal ini berisikan penjaminan terhadap upaya kecil-kecilan oleh pencari keadilan bangsa pribumi secara individual yang dimungkinkan oleh hukum untuk membuat pilihan hukum (*vrijwillige onderwerping*) dan upaya yang “besar-besaran” lewat wewenang Gubernur Jenderal untuk menerapkan peraturan perundang-undangan Eropa tertentu (manakala dipandang perlu) ke golongan penduduk pribumi (*toepasselijk verklaring*).

Scholten van Oud-Haarlem, sebagai penggagas mengungkapkan harapannya dalam pasal-pasal RR 1854 ini agar golongan penduduk pribumi dapat memiliki haknya baik dalam hal politik maupun ekonomi secara adil dan luas, baik yang berdasarkan upaya personal penduduk maupun kedewasaan Gubernur Jenderal dalam penetapan kebijakannya di tanah Hindia-Belanda. Meski demikian, *vrijwillige onderwerping* pada praktiknya

⁶⁵ Istilah hukum adat (*adatrecht*) diawali oleh C. Snouck-Hurgronje dalam Jilid pertama buku *De Atjehers* yang dibuatnya pada tahun 1893.

sangat jarang dimanfaatkan oleh golongan pribumi dalam mencari keadilannya.

Persoalan lain yang terjadi pada periode ini adalah terkait penataan organisasi badan-badan peradilan. Persoalan tentang unifikasi dan dualisme dalam tatanan hukum kolonial ini bukan hanya tentang hukum substantif melainkan juga pada hukum acara. Dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie (RO)* 1847, tatanan organisasi badan-badan peradilan yang tercantum berjumlah tak kurang dari delapan yakni *Districtsgerecht*, *Regentschapgerecht*, *Landraad*, *Rechtbank van Ommegang*, *Rechtspraak ter Politierol*, *Residentiegerecht*, *Raad van Justitie*, dan *Hooggerechtshof*.⁶⁶

⁶⁶ *Districtsgerecht* adalah badan pengadilan yang diselenggarakan di daerah-daerah kewedanan (distrik) untuk orang-orang pribumi, dengan wedana (pejabat pemerintahan yang berkedudukan langsung dibawah bupati) bertindak sebagai hakim dalam perkara perdata, berkenaan dengan objek sengketa yang berharga tak lebih dari 2 gulden, dan dalam perkara pelanggaran yang diancam pemidanaan denda setinggi-tingginya tiga gulden. *Regentschapgerecht* adalah badan pengadilan yang diselenggarakan di kabupaten-kabupaten untuk orang pribumi, dengan *Regent* (bupati) atau wakilnya (*patih*) bertindak sebagai hakim. *Landraad* adalah badan pengadilan harian yang bersifat normal (*normal native court*) untuk orang pribumi kebanyakan. *De Rechtbank van Ommegang* adalah badan pengadilan untuk orang pribumi yang mengadili kejahatan berat seperti pembunuhan, perampokan, dan pemberontakan yang dapat dijatuhi hukuman mati. *Rechtspraak ter Politierol* adalah badan yang mengadili perkara-perkara sumit yang tidak masuk dalam yurisdiksi *Landraad* dan *Rechtsbank van Ommegang*. *Residentiegerecht* adalah badan pengadilan pemerintah kolonial yang secara eksklusif akan memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama perkara-perkara orang Eropa. *Raad van Justitie* adalah badan pengadilan yang mengadili orang-orang Eropa di manapun ia bermukim di Hindia-Belanda (dan bangsawan tingkat pribumi) dan perkara-perkara perdata serta pidana yang tidak masuk kedalam kompetensi pengadilan yang diselenggarakan oleh Residen. Dan *Hooggerechtshof* adalah badan pengadilan yang berkedudukan tertinggi dalam hirarki peradilan kolonial, dan berkompetensi sebagai badan pengadilan kasasi untuk semua keputusan *Landraad* dalam perkara-perkara perdata, dan badan pengadilan banding untuk keputusan-keputusan tingkat pertama yang dibuat oleh *Raad van Justitie*. Satu-satunya perkara yang boleh diperiksa dan diputusi pada tingkat pertama oleh *Hooggerechtshof* adalah gugatan perdata yang diajukan terhadap pemerintah (Hindia-Belanda) atau terhadap Gubernur Jenderal.

Untuk *Districtsgerecht*, *Regentschapgerecht*, *Landraad*, *Rechtbank van Ommegang*, dan *Rechtsspraak ter Politierol*, adalah pengadilan yang bekerja menurut yurisdiksinya hanya akan kompeten mengadili orang-orang dari golongan rakyat pribumi. Sedangkan *Residentiegerecht*, *Raad van Justitie*, dan *Hooggerechtshof* adalah badan pengadilan yang menurut yurisdiksinya hanya akan berkompeten memeriksa dan memutusi perkara-perkara untuk golongan penduduk Eropa. Sebagai catatan, *Raad van Justitie* juga akan bertindak sebagai pengadilan pada tingkat banding sedangkan *Hooggerechtshof* juga bertindak sebagai pengadilan pada tingkat kasasi untuk perkara-perkara orang pribumi yang diadili oleh *Landraad*.

Diluar kedelapan badan peradilan diatas, juga terdapat badan peradilan yang bekerja dan tidak terbilang sebagai bagian dari peradilan pemerintah kolonial, seperti pengadilan swapraja yang ada dan dikelola oleh raja-raja, sultan-sultan, dan/atau pangeran-pangeran. Di teritori-teritori tertentu terdapat pula pengadilan yang lazim disebut sebagai pengadilan desa (*Desa Rechtspraak*).

Untuk *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sendiri berlaku terhitung sejak 1 Januari 1873 berdasarkan ordonansi yang termuat dalam Ind. Stb. 1872 No. 85 mengenai berlakunya *Wetboek van Strafrecht 1830*. Kitab ini juga merupakan representase terhadap penjaminan kepastian perlindungan bagi orang-orang pribumi terhadap

bestuurswillekeur.⁶⁷ Pada saat berlakunya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya berlaku bagi orang-orang pribumi. Barulah pada tahun 1918 kitab ini juga berlaku bagi orang-orang Eropa.

2. Periode Kedua (1890-1940)

Pada periode ini terdapat perubahan besar terhadap tatanan hukum yang berlaku di Hindia Belanda, khususnya pada tahun 1920 dimana *Regerings Reglement* (IS) 1854 digantikan dengan *Regerings Reglement* yang baru, yang kemudian pada tahun 1925 teradopsi kedalam *Indische Staatsregeling* (IS) dan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1926.

Pada periode ini, penulis membagi pembabakan kecil untuk menguraikan sejarah tatanan hukum kolonial pada saat itu yakni periode kecil 1890-1920 dan periode kecil 1920-1940. Pembabakan kecil ini dibagi berdasarkan perubahan hukum *Regerings Reglement* (RR) 1854 ke RR baru, dan *Indische Staatsregeling* nantinya.

Periode kecil pertama (1890-1920) merupakan sebuah periode yang menandai proses dialektika antara hukum kolonial dan otonomi hukum adat dalam bingkai desentralisasi pemerintahan yang dimana pada faktanya merujuk pada orientasi ekonomi pihak kolonial atas upaya yang disebutkan sebagai upaya emansipatif masyarakat adat atas kungkungan adatnya

⁶⁷ *Bestuurswillekeur* dalam bahasa Belanda berarti kesewenang-wenangan pejabat pemerintah.

Sebelumnya, pihak kolonial merupakan subjek eksploitasi atas wilayah Hindia Belanda melalui kebijakan *kulturstelsel* (monopoli usaha ekonomi oleh pihak kolonial), namun anomali atas dampak revolusi Perancis yang berhasil menyebarkan ide-ide liberal memaksa mereka menghentikan praktik ini. Keberhasilan ini sayangnya tidak berdampak apa-apa bagi masyarakat pribumi. Ruang besar bagi pihak swasta untuk memperluas ruang perdagangan mereka secara kapitalistik tidak mengubah status rakyat pribumi dan wilayahnya sebagai objek eksploitasi.

Pada tahun 1903, terjadi amandemen parsial dalam RR 1854. Amandemen tersebut berisi *De Wet Houdende Desentralisatie van Het Bestuur in Nederlands-Indie* atau lebih dikenal dengan *Desentralisatie Wet*. Amandemen tersebut berisi tiga pasal baru diantara pasal 68 dan 69 yakni pasal 68a, 68b, dan 68c.

Pasal 69a⁶⁸ pada intinya berisi ketentuan yang menyatakan bahwa sejumlah dana dapat disisihkan untuk dipakai sebagai dana oleh suatu daerah (*gewest*) atau suatu bagian dari suatu daerah (*gedeelte de gewest*), dan bahwa dewan-dewan daerah setempat (*locale raden*) akan dibentuk berdasarkan ordonansi untuk *gewesten* dan/atau *gedeelten de gewest*. Pasal 68b menyatakan pula bahwa kecuali ditentukan lain, pengelola dan pertanggungjawaban anggaran yang teralokasikan sebagai keuangan daerah

⁶⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit*, hlm. 115

sendiri itu, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan ditaruh dibawah pengawasan suatu badan pengawasan keuangan, dan bahwa pengurusan keuangan dan pengaturan mengenai pembelanjaan akan diserahkan seleluasa mungkin kepada suatu *raad* di daerah atau bagian dari suatu daerah yang pembentukannya akan ditentukan dengan ordonansi. Pasal 68c menyatakan bahwa *raad* berwenang mengajukan apapun yang berkenaan dengan kepentingan daerahnya kepada gubernur jenderal, sedangkan kewenangan lain, tugas kerjanya, tata tertib kelembagaannya, penunjukan ketuanya, pemilihan anggotanya, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan semua itu masih akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Dinyatakan pula bahwa berdasarkan ordonansi kepada *raad* juga dapat diberikan kewenangan menarik pajak guna memperoleh sumber keuangan daerah sendiri yang dilakukan dibawah pengawasan gubernur jenderal.

Selain mengenai penyusunan pengelolaan keuangan, sebelumnya juga –tepatnya tahun 1893- Menteri Koloni Baron van Dedem mengusulkan perombakan *Raad van Indie* agar menjadi wujud baru bernama *een koloniale raad* -upaya ini adalah salah satu dari upaya *bestuurs hervorming*-. Perbedaannya adalah mengenai komposisi anggotanya, yang awalnya hanya dari kalangan pejabat pemerintah saja kemudian diusulkan agar diantara anggotanya ada empat orang dari swasta. Namun usulan van

Dedem ini baru lagi dibicarakan pada tahun 1907 oleh Menteri Koloni Fock. Berlanjut pada tahun 1911, dibawah Menteri Koloni de Waal Malefijt mengusulkan penyegeraan pembentukan *koloniale raad* karena menganggap bahwa Hindia Belanda telah lama menjadi badan hukum.

Pada tahun 1913, dibawah Menteri Koloni Th. B. Pleijte disusunlah rancangan undang-undang yang dikerjakan untuk membentuk suatu badan yang berkarakter perwakilan dan ramoung pada tahun yang sama. Rancangan undang-undang itu tidak bertujuan mengubah kedudukan dan susunan *Raad van Indie*, (suatu badan eksekutif yang telah berumur lama, yaitu sejak zaman pemerintahan VOC di Batavia), akan tetapi *De Koloniale Raad* dengan karakter sebagai badan perwakilan, maka Pleijte mengusulkan agar sebutan *koloniale raad* tidak lagi dipakai. Sebagai gantinya, ia mengusulkan nama khusus, yaitu *Volksraad* dan nama ini langsung disetujui.⁶⁹

Pada tanggal 16 Desember 1916, Parlemen Belanda menyetujui rancangan *Volksraad* tersebut yang kemudian diuandangkan sebagai *wet* melalui *Nederlandsch Staatsblad* 1916 No. 535 dan Ind. Stb. 1917 No. 114. Undang-undang ini juga mengubah dan menambah beberapa pasal dalam *Regeringsreglement 1854*. Berikutnya tentang aturan yang lebih rinci terkait susunan atau komposisi *Volksraad*, tata cara pemilihan anggotanya serta tata tertib persidangan diatur melalui *Koninklijk Besluit*. Berlakunya

⁶⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit*, hlm. 123

Volksraad ini mulai pada tanggal 1 Juni 1918 namun baru mulai bersidang pada tahun 1921, setelah penunjukan dan pemilihan anggota.

Selain *Volksraad* sebagai bentuk perwakilan secara umum, juga kemudian dibentuk badan perwakilan dalam skala *provinciale*/provinsi dan *regentschap*/kabupaten.

Pada tahun 1914 hingga 1919 terjadi perdebatan terkait Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara van Vollenhoven yang merupakan seorang penganut dalih Savignian dan Th. B. Pleyte yang merupakan perancang undang-undang yang berlawanan dengan semangat kontra unifikasi hukum Eropa dan adat di wilayah kolonial Hindia Belanda. Sebelumnya, pada tahun 1904 telah diajukan sebuah rancangan amandemen undang-undang yang disusun P.J. Idenburg yang kemudian disempurnakan J.W.H.M. van Idsinga yang berisi semangat non-unifikasi terhadap hukum kodifikasi yang berlaku di Hindia Belanda dengan dalih menolak hukum Eropa yang dianggap superior terhadap hukum adat yang dianggap inferior.

Akhirnya pada tahun 1919 rancangan Pleyte tersebut ditarik kembali, dan sebagai gantinya rancangan undang-undang van Idsinga dinyatakan mulai berlaku untuk menyempurnakan Pasal 75 RR 1845, yang kelak dimasukkan sebagai bagian dari Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (disingkat IS, yang berlaku sebagai pengganti RR 1854).

Sementara untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang awalnya hanya berlaku bagi orang-orang pribumi, pada tahun 1918 kitab ini akhirnya juga berlaku bagi orang-orang Eropa.

Periode kecil berikutnya (1920-1940) adalah periode yang menggambarkan bagaimana perubahan tatanan hukum kolonial *Regeringsreglement* (RR) 1854 yang pada tahun 1920 mengalami amandemen dan menjadi RR baru hingga pada berlakunya *Indische Staatsregeling* (IS) 1925.

Pada tahun 1920-1926, merupakan masa berlakunya RR baru yang merupakan amandemen RR lama yakni 1854. Muatan RR yang baru ini pada tahun 1926 dimodifikasi dan teradopsi kedalam *Indische Staatsregeling* (IS) 1925 yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1926 berdasarkan Stb. 1925 No. 415.

Pasal 109 RR 1854 yang mengatur penggolongan rakyat kedalam tiga golongan masih tetap berlaku dan diteruskan sebagai Pasal 163 *Indische Staatsregeling* 1925. Pembagian tiga golongan tersebut adalah Eropa, Pribumi, dan Timur Asing (Cina dan Timur Asing lainnya yang bukan Cina). Maksud dari penggolongan Eropa bukan saja merujuk pada Belanda atau negara Eropa lainnya, melainkan mereka yang berasal dari negara yang hukum terkait keluarganya menganut hukum yang serupa dengan Belanda seperti Jepang, Thailand, dan Turki. Adapun yang tergolong sebagai golongan pribumi adalah semua penduduk asli di tanah jajahan, kecuali

mereka yang telah menundukkan diri secara penuh dan sukarela ke dalam hukum golongan lain atau telah meleburkan diri ke dalam golongan itu dan tidak hendak masuk kembali ke golongan asalnya. Sementara golongan Timur Asing adalah mereka semua yang tidak masuk ke dalam dua golongan yang telah disebutkan terdahulu; mereka ini masih dibedakan lagi antara sub-golongan Cina dan sub-golongan Timur Asing lainnya (ialah misalnya Arab dan India.⁷⁰

Sementara Pasal 75 *Regeringsreglement* 1854 yang termodifikasi ke dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling* 1925 berisi pengaturan asas-asas umum yang harus diikuti oleh badan perundang-undangan kolonial ketika harus membentuk atau membuat undang-undang.

Pasal 131 ayat 1 IS menyatakan bahwa hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, dan hukum acara (baik pidana maupun perdata) harus diatur dengan ordonansi.

Pada ayat 2 huruf a Pasal 131 IS, menyatakan bahwa untuk orang-orang Eropa, ordonansi yang mengatur hukum perdata dan hukum dagang harus konkordan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Penyimpangan dari asas konkordansi ini hanya boleh dilakukan oleh pembuat undang-undang manakala keadaan khusus di Hindia-Belanda mengharuskan hal itu, atau apabila orang-orang Eropa di Hindia-Belanda ini ditundukan ke hukum yang juga diberlakukan secara bersama-sama untuk

⁷⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit*, hlm. 167

golongan penduduk yang lain atau untuk sebagian daripadanya. Sementara di huruf b, menyatakan bahwa ordonansi di huruf a dinyatakan berlaku pula untuk golongan rakyat Pribumi dan Timur Asing, manakala terdapat bukti-bukti bahwa memang ada kebutuhan hukum yang dirasakan nyata oleh kedua golongan penduduk itu akan hukum yang berlaku untuk golongan Eropa. Untuk golongan Pribumi dan Timur Asing ini dapat pula dinyatakan berlaku untuk seluruh golongan penduduk tanpa terkecuali.⁷¹

Pasal 131 ayat 3 IS menuliskan ketentuan bahwa hukum acara perdata dan hukum acara pidana yang diordonansikan secara khusus untuk orang-orang dari golongan Eropa harus tetap menganut asas konkordansi.

Sementara pada ayat 4 menyatakan bahwa untuk orang Pribumi dan Timur Asing dibuka kemungkinan, kecuali apabila mereka ini sudah ditundukkan ke hukum yang juga berlaku untuk orang-orang Eropa, untuk menundukkan diri secara sukarela ke dalam hukum perdata dan hukum dagang Eropa yang selama ini tidak dinyatakan secara eksplisit berlaku untuk mereka itu. Penundukan sukarela ini dapat dilakukan untuk mengenakan seluruh hukum perdata dan hukum dagang Eropa kepada subyek yang bersangkutan, akan tetapi dapat pula untuk sebagian saja,

⁷¹ Kecuali karena alasan yang disebutkan di muka, dalam ihwal lain ordonansi akan tetap menghormati hukum agama dan hukum kebiasaan (hukum adat) golongan penduduk yang bukan Eropa, sekalipun kemungkinan masih tetap terbuka untuk mengabaikan hukum agama dan hukum adat itu manakala dikehendaki demi kepentingan umum atau demi pemenuhan kebutuhan baru yang dirasakan dalam masyarakat.

yaitu untuk transaksi-transaksi tertentu saja. Cara penundukan diri seperti ini, dan juga akibat-akibatnya, akan diatur lebih lanjut dalam sebuah ordonansi.

Berikut adalah pembagian golongan dan sistem hukum yang berlaku pada masa *Indische Staatsregeling* 1925 :

- I. Golongan Eropa sebagaimana tercantum dalam Pasal 131 IS adalah hukum perdata yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang diundangkan berlakunya tanggal 1 Mei 1848 dengan asas konkordansi, hukum pidana materil yaitu *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang diundangkan berlakunya tanggal 1 Januari 1918 melalui S. 1915:732, dan hukum acara yang dilaksanakan dalam proses pengadilan bagi golongan Eropa di Jawa dan Madura diatur dalam *Reglement op de Burgerlijk Rechts Vordering* untuk proses perdata, dan *Reglement op de Straf Vordering* untuk proses perkara pidana, yang keduanya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

Adapun susunan peradilan yang dipergunakan bagi golongan Eropa di Jawa dan Madura adalah :

1. *Residentie Gerecht*
2. *Raad van Justitie*
3. *Hoggerrechtshof*

Sedangkan acara peradilan di luar Jawa dan Madura diatur dalam *Rechts Reglement Buitengewesten* (R.Bg) berdasarkan S.1927:227 untuk daerah hukumnya masing-masing.

II. Bagi golongan Pribumi (Bumi Putera)

a. Hukum perdata adat dalam bentuk tidak tertulis. Tetapi dengan adanya Pasal 131 ayat 6 IS, kedudukan berlakunya hukum perdata adat itu tidak mutlak, dan dapat diganti dengan ordonansi jika dikehendaki oleh pemerintah Hindia-Belanda. Kemudian demikian telah dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai ordonansi yang diberlakukan untuk semua golongan yaitu :

1. S.1933:48 Jo S.1939:2 tentang peraturan pembukuan kapal;
2. S.1933:108 tentang peraturan umum untuk perhimpunan koperasi;
3. S. 1938:523 tentang ordonansi orang yang meminjamkan uang;
4. S. 1938:524 tentang ordonansi riba.

Sedangkan hukum yang berlaku bagi golongan pribumi, yaitu:

1. S. 1927:91 tentang koperasi pribumi;
2. S. 1931:53 tentang pengangkatan wali di Jawa dan Madura;

3. S. 1933:74 tentang perkawinan orang Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon;
4. S. 1933:75 tentang pencatatan jiwa bagi orang Indonesia di Jawa, Madura, Minahas, Ambonia, Saparua, dan Banda;
5. S. 1939:569 tentang Maskapai Andil;
6. S. 1939:570 tentang perhimpunan pribumi.

Semua staatsblad diatas adalah ordonansi yang berkaitan dengan bidang hukum perdata.

b. Hukum pidana materil yang berlaku bagi golongan pribumi adalah :

1. *Wetboek van Strafrecht* (WvK) sejak tahun 1918 berdasarkan S. 1915:723;
2. Hukum acara perdata untuk daerah Jawa dan Madura adalah *Inlands Reglement* (IR) dan hukum acara pidana bagi mereka diatur dalam *Herziene Inlands Reglement* (HIR) berdasarkan S. 1941:44 tanggal 22 Februari 1941. HIR ini berlaku di *landraad* Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Susunan peradilan bagi pribumi di Jawa dan Madura adalah sebagai berikut:

1. *District Gerecht*, di daerah pemerintahan distrik (kewedanan);
2. *Regentschaps Gerecht*, di daerah kabupaten yang diselenggarakan oleh Bupati, dan sebagai pengadilan banding;
3. *Landraad*, terdapat di kota kabupaten dan beberapa kota lainnya yang diperlukan adanya peradilan ini, dan mengadili perkara banding yang diajukan atas putusan *Regentschaps Gerecht*.

Bagi daerah-daerah di luar Jawa dan Madura, susunan organisasi peradilanannya untuk golongan pribumi diatur dalam: *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg), dan lembaga peradilan lainnya adalah:

1. *Negorijrecht bank*, terdapat pada desa (negari) di Ambon;
2. *Districts Gerecht*, terdapat diewedanan dari keresidenan Bangka, Beliteung, Manado, Sumatera Barat, Tapanuli, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
3. *Mgistraats Gerecht*, menangani keputusan *Districts Gerecht* di Beliteung, dan Manado, sedangkan untuk Ambon menangani keputusan *Negorijrecht bank*;

4. *Landgerecht*, kedudukan dan tugasnya sama dengan *Landraad* di Jawa, tetapi untuk daerah *Landraad* Nias, Bangkulu, Majene, Palopo, Pare-Pare, Manokwari, dan Fak-Fak jabatan ketua dapat diserahkan kepada pegawai pemerintah Belanda, karena kekurangan Sarjana Hukum.

III. Bagi golongan Timur Asing, berlakulah:

- a. Hukum perdata, hukum pidana adat mereka menurut ketentuan pasal 11 AB, berdasarkan S. 1855:79 (untuk semua golongan Timur Asing);
- b. Hukum perdata golongan Eropa (BW) hanya bagi golongan Timur Asing Cina untuk wilayah Hindia-Belanda melalui S. 1924:557. Dan untuk daerah Kalimantan Barat berlakunya BW tanggal 1 September 1925 melalui S. 1925:92;
- c. WvS yang berlaku sejak 1 Januari 1918 untuk hukum pidana materil;
- d. Hukum acara yang berlaku bagi golongan Eropa dan hukum acara yang berlaku bagi golongan pribumi, karena dalam praktik kedua hukum acara tersebut digunakan untuk peradilan bagi golongan Timur Asing.

Dalam penyelenggaraan peradilan, disamping susunan peradilan yang disebutkan diatas juga melaksanakan peradilan lain, yaitu:

1. Pengadilan Swapraja;
2. Pengadilan Agama;
3. Pengadilan Militer.

3. Periode Ketiga (1940-1945)

Periode besar ke tiga atau yang terakhir (1940-1945), akan menguraikan bagaimana peralihan hukum kolonial Belanda ke hukum pendudukan Jepang di Indonesia, tatanan hukum pendudukan Jepang, serta persiapan peralihan hukum pendudukan Jepang menuju hukum nasional.

Tahun 1942, Jepang memulai menancapkan sistem hukum pendudukannya pasca kemenangan mereka terhadap Belanda yang sebelumnya dipicu serangan Jepang ke pangkalan angkatan laut Amerika Serikat –yang merupakan sekutu Belanda- di Pearl Harbour, Hawaii pada tahun 1941.

Saat menduduki Indonesia, Jepang membagi daerah menjadi tiga wilayah komando mereka yakni Jawa dan Madura, Sumatera yang dikontrol Singapura sebagai pusatnya, dan Indonesia bagian timur. Berdasarkan

undang-undang balatentara Jepang (*Osamu Seirei*)⁷² tahun 1942 No. 1, yang berlaku untuk Jawa dan Madura, dimaklumkan bahwa seluruh wewenang badan-badan pemerintahan dan semua hukum dan peraturan yang selama ini berlaku tetap dinyatakan berlaku kecuali apabila bertentangan dengan peraturan-peraturan wilayah Jepang.⁷³ Peraturan serupa juga berlaku di dua wilayah komando lainnya.

Melalui *Osamu Seirei* No. 1 Tahun 1942 ini, jelaslah bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum balatentara Jepang datang ke Indonesia masih tetap berlaku. Dengan demikian pasal 131 IS sebagai pasal politik hukum dan pembagian golongan penghuni Indonesia menurut pasal 163 IS masih berlaku.

Perubahan kecil hanya terdapat pada beberapa aturan seperti kitab undang-undang dan ketentuan-ketentuan perundangan yang lain di bidang hukum perdata yang semula berlaku untuk orang-orang Belanda kini juga dinyatakan berlaku untuk orang-orang Cina. Selain itu, dalam perundang-undangan pidana, beberapa peraturan militer diimbuhkan pada peraturan perundangan pidana yang telah berlaku dan dinyatakan berlaku untuk semua golongan penduduk. Sementara hukum adat tetap dinyatakan berlaku untuk orang-orang pribumi.

⁷² Pada masa pendudukan Jepang, pelaksanaan tata pemerintahan di Indonesia berpedoman pada undang-undang yang disebut *Gun Seirei* melalui *Osamu Seirei*. Sementara peraturan pelaksanaannya disebut *Osamu Kanrei*.

⁷³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit*, hlm. 171

Selanjutnya, pemerintah balatentara Jepang juga mengeluarkan *Gun Seirei* Nomor Istimewa tahun 1942, *Osamu Seirei* No. 25 Tahun 1944, memuat aturan-aturan pidana yang umum dan aturan-aturan pidana yang khusus, sebagai pelengkap peraturan yang telah ada sebelumnya.

Sedangkan *Gun Seirei* No. 14 Tahun 1942 mengatur susunan lembaga peradilan yang terdiri dari:⁷⁴

1. *Tihoo Hooiin*, berasal dari *landraad* (Pengadilan Negeri);
2. *Keizai Hooiin*, berasal dari *landgerecht* (Hakim Kepolisian);
3. *Ken Hooiin*, berasal dari *Regentschap Gerecht* (Pengadilan Kabupten);
4. *Gun Hooiin*, berasal dari *Districhts Gerecht* (Pengadilan Kewedanan);
5. *Koikyoo Kootoo Hooiin*, berasal dari *Hof Voor Islami etische Zaken* (Mahkamah Islam Tinggi);
6. *Sooyoo Hooiin*, berasal dari *Priesterraad* (Rapat Agama);
7. *Gunsei Kensatu Kyoko*, terdiri dari *Tihoo Kensatu Kyoko* (Kejaksaan Pengadilan Negeri), berasal dari *Paket voor de Landraaden*.

Adapun wewenang *Raad van Justitie* dialihkan kepada *Tihoo Hooiin* dan *Hooggerechtshof* tidak disebut-sebut dalam undang-undang itu.

⁷⁴ Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 16

Pada perkembangan dinamika pendudukan Jepang yang berkonfrontasi dengan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajahan, 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang Keiniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan Indonesia di masa depan. Pernyataan ini kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya sebuah badan persiapan kemerdekaan Indonesia yang kemudian disebut *Dokuritsu Zyuunbi Coosakai* atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) bagi bangsa Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Pembentukan badan ini pun merupakan realisasi janji Jepang yang sebelum-sebelumnya dianggap hanya sekedar janji oleh bangsa Indonesia. Masa persidangan BPUPK terdiri dari dua babak. Masa sidang pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, sedangkan masa sidang kedua dari tanggal 1 Juli hingga 17 Juli 1945.⁷⁵

Tanggal 29 Mei 1945, sidang BPUPK yang pertama dibuka. Agenda BPUPK pada saat itu adalah pembicaraan tentang dasar negara. Sejak pembukaan sidang hingga pada tanggal 1 Juni 1945, banyak pendapat tentang dasar negara Indonesia. Perdebatan yang terjadi berkulat pada dasar negara yang berlandaskan prinsip Islam dan nasionalisme. Hingga pada tanggal 1 Juni, setelah memperhatikan pendapat para peserta sidang Soekarno mendapatkan kesempatan untuk berpidato tentang pandangannya

⁷⁵ Struktur keanggotaan BPUPK terlampir.

terhadap dasar negara. Soekarno dengan lugas memaparkan konsep Pancasila – versi awal- yang berisi lima nilai yang harus dijunjung dan dijadikan sebagai dasar negara.

Mendapatkan banyak tanggapan di hari yang sama, BPUPK kemudian membentuk panitia kecil yang berjumlah delapan orang, yang biasa disebut panitia delapan yang bertugas mengumpulkan usul-usul para anggota sidang BPUPK yang pertama yang kemudian akan dibahas pada masa sidang yang kedua. Pemaparan pandangan Soekarno dan dibentuknya panitia delapan sekaligus menutup dinamika sidang pertama tersebut.

Pada masa sela (tepatnya 18-21 Juni 1945) sebelum masuk sidang yang kedua, Soekarno berinisiatif untuk membentuk panitia kecil tidak resmi yang beranggotakan sembilan orang, yang kemudian disebut panitia sembilan yang bertujuan untuk menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan pada tanggal 22 Juni para panitia menyetujui susunan pembukaan UUD tersebut. Rancangan pembukaan yang memuat dasar negara tersebut oleh Soekarno disebutnya Mukkadimah, oleh Yamin disebutnya Piagam Jakarta, sementara Sukiman Wirjosandjojo sebagai *Gentlemen's Agreement*.⁷⁶

⁷⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, PT GramediaPustaka Utama, hlm. 24

Tanggal 10 Juli 1945, dibuka sidang BPUPK yang kedua. Soekarno yang mewakili panitia sembilan memaparkan hasil rancangan susunan pembukaan UUD tersebut. Rancangan tersebut menuai kritik, terutamanya dilontarkan oleh Latuharhary yang menganggap bahwa terdapat tujuh redaksi kata yang sangat mendiskriminasi suatu golongan rakyat Indonesia yang beragama non-muslim.⁷⁷ Namun setelah mengalami sidang dengan kondisi yang sangat emosional, maka kritik Latuharhary kemudian diluruhkan ke konsep pembukaan UUD awal.

Tanggal 11 Juli 1945, BPUPK (dalam hal ini Radjiman, sebagai ketua sidang BPUPK) membentuk tiga panitia perancang yang mengurus masing-masing yakni perancang hukum dasar, keuangan dan ekonomi, dan pembelaan tanah air.

Pada tanggal yang sama, Soekarno kembali membentuk tim kecil untuk menyusun rancangan UUD yang salah satu anggotanya adalah seorang sarjana hukum yang sudah menjadi spesialis pembuat peraturan perundang-undangan, Soepomo. Soepomo secara personal menganut reori yang digagasnya sendiri yakni hukum integralistik, namun untuk kasus perumusan UUD ini, Soepomo meluruhkan gagasannya ke kondisi Indonesia yang sangat mementingkan tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia.

⁷⁷ Isi tujuh kata tersebut adalah “Ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Kurang dari dua hari, panitia kecil bentukan Soekarno kemudian memaparkan hasil rancangannya yang kemudian oleh panitia perancang bentukan BPUPK pada tanggal 13 Juli 1945 melakukan pembahasan terkait rancangan panitia kecil tersebut.

Tanggal 14 Juli 1945, lahirlah rancangan UUD kedua yang merupakan hasil perbincangan panitia perancang dan peserta sidang BPUP dalam rapat besar BPUPK. Sehari kemudian hingga tanggal 16 Juli 1945, lahirlah rancangan ketiga sekaligus yang terakhir berdasarkan hasil perbincangan para peserta BPUPK pada rapat besar setelah mendapatkan usulan-usulan baru.

Tanggal 17 Juli 1945 yang merupakan hari terakhir atau penutupan sidang BPUPK yang kedua, BPUPK menghasilkan suatu hal yang diluar dari skenario Jepang yang awalnya hanya merupakan panitia penyelidikan kemerdekaan justru berubah agenda yang menghasilkan susunan dasar negara Indonesia yakni Pancasila, dan pembukaan UUD sebagai norma dasar dan UUD sebagai aturan dasar atau konstitusi Indonesia kelak setelah merdeka.

E. Peralihan Tataan Hukum Kolonial Menuju Hukum Nasional

Beberapa perubahan hukum yang terjadi pada masa kolonial yang oleh penulis memulainya pada pembabakan masa pemberlakuan RR 1854 atas pengubahan *Groundwet* 1848 di Negeri Belanda hingga hukum pendudukan Jepang di Indonesia memberikan dinamika yang berujung pada sejarah peralihannya menuju hukum nasional Indonesia.

Tataan hukum yang dibentuk oleh kolonial Belanda memberi banyak warisan yang kemudian baik oleh pihak Jepang maupun tatanan hukum di Indonesia terintrodusir untuk digunakan dalam tata hukumnya. Warisan-warisan hukum tersebut meskipun di kemudian hari terdapat beberapa hukum yang dapat diubah dan digantikan dengan undang-undang yang lebih mendukung semangat kemerdekaan Indonesia, namun karena kondisi yang memaksa untuk mengutamakan kepentingan mempertahankan kemerdekaan sehingga ada beberapa undang-undang atau hukum warisan kolonial yang masih digunakan.

Berhasilnya BPUPK dalam menyusun rancangan dasar negara dalam pembukaan UUD 1945 dan hukum dasar yang terwujud dalam UUD 1945 memberikan ruang yang lebih bagi bangsa Indonesia untuk menentukan secara mandiri *legal ordemya* sendiri. Peralihan tersebut ditandai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang kemudian disusul dengan pemberlakuan UUD pada tanggal 18 Agustus 1945.

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, untuk pertama kalinya *Dokuritsu Zyunbi linkai* atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melakukan sidangnya. Sidang ini menetapkan dua hal:⁷⁸

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berasal dari Piagam Jakarta;
2. Undang-Undang Dasar yang berasal dari naskah Rancangan Undang-Undang Dasar yang disepakati dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Indonesia pada tanggal 16 Juli 1945. Naskah ini telah dikirim kepada pemerintah balatentara Jepang.

Terdapat beberapa perubahan yang terjadi antara isi UUD dan pembukaannya versi sidang BPUPK dengan sidang PPKI. Perubahan tersebut tidak dapat dinafikkan bahwa hal tersebut merupakan proses politis yang emosional. Penghapusan “tujuh kata” di belakang sila ketuhanan yang berubah menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa” juga berimplikasi pada pengubahan bunyi pasal 6 ayat 1 yang menghapuskan syarat presiden adalah orang Islam menjadi hanya “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Demikian pula, bunyi pasal 29 ayat 1 menjadi “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tanpa disertai “tujuh kata” di belakangnya.⁷⁹

⁷⁸ Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 57-58

⁷⁹ Yudi Latif, *Op.Cit.* hlm. 35

Tentang pencoretan “tujuh kata” tersebut, Muhammad Hatta punya andil besar, seperti diakui sendiri dalam otobiografinya, *Memoir Mohammad Hatta* (1979). Pagi hari menjelang dibukanya rapat PPKI, Hatta mendekati tokoh-tokoh Islam agar bersedia mengganti kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam rancangan Piagam Jakarta dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Alasannya demi menjaga persatuan bangsa. Teuku Hasan, Ki Bagus, dan Kasman adalah beberapa dari golongan Islam yang menyepakati usulan Hatta tersebut. Sementara Wachid Hasjim pada saat tidak dapat hadir, namun dikemudian hari menyambut positif hal tersebut.

Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 ini kemudian disiarkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 pada tanggal 15 Februari 1946.⁸⁰

Tanggal 19 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang keduanya dengan keputusan sebagai berikut:⁸¹

1. Tentang daerah provinsi, dibagi ke dalam delapan wilayah yaitu:
 - a. Jawa Barat;
 - b. Jawa Tengah;
 - c. Jawa Timur;
 - d. Sumatera;
 - e. Borneo;
 - f. Sulawesi;
 - g. Maluku
 - h. Sunda kecil.

⁸⁰ Terlampir

⁸¹ Sekretariat Negara RI, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, Jakarta, Sekretariat Negara RI, hlm.461

2. Pembentukan dua belas Departemen, yaitu:
 - a. Departemen Dalam Negeri;
 - b. Departemen Luar Negeri;
 - c. Departemen Kehamitan;
 - d. Departemen Keuangan;
 - e. Departemen Kemakmuran;
 - f. Departemen Kesehatan;
 - g. Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan;
 - h. Departemen Sosial;
 - i. Departemen Pertahanan;
 - j. Departemen Penerangan;
 - k. Departemen Perhubungan;
 - l. Departemen Pekerjaan Umum.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang ketiga dengan agenda pembahasan “Badan Penolong Keluarga Korban Perang”, yang keputusannya menghasilkan delapan pasal. Dalam pasal 2 dibentuklah suatu badan yang disebut Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kemudian PPKI mengadakan sidangnya yang keempat pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan agenda pembahasan Komite Nasional Partai Nasional Indonesia yang pusatnya berkedudukan di Indonesia.

Berdasarkan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 dan 19 Agustus 1945, secara formal negara Indonesia telah memenuhi unsur-unsur terbentuknya suatu negara, yaitu adanya rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, serta mempunyai tujuan negara.

Dalam hal ini, dapat dijelaskan bahwa lahirnya pemerintahan Negara Republik Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 pada saat ditetapkannya

UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan ditetapkannya Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian sejak tanggal tersebut Negara Republik Indonesia telah memiliki Undang-Undang Dasar sebagai pelaksana pemerintahan, Presiden sebagai pimpinan pemerintahan.⁸²

⁸² Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 70

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah pada bab pertama sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori-teori perubahan hukum dan fakta sejarah hukum yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa selama berlakunya tatanan hukum kolonial yang diawali oleh berlakunya *Regeringsreglement* (RR) 1854 di wilayah kolonial Hindia Belanda yang merupakan konsekuensi dari pemberlakuan *Groundwet* 1848 di Negeri Belanda hingga tatanan hukum pendudukan Jepang di Indonesia telah terjadi beberapa perubahan tatanan hukum. Berlakunya RR 1854 merupakan pemberlakuan yang dilakukan secara konstitusional berdasarkan *Groundwet* 1848 Negeri Belanda.

Setelahnya, RR 1854 ini kemudian mengalami amandemen pada tahun 1920. Perubahan ini pula adalah perubahan yang dilakukan secara konstitusional. Tahun 1926, RR baru tersebut kemudian diubah menjadi *Indische Staatsregeling* melalui Stb. 1925 No. 415.

Perubahan ini juga merupakan perubahan yang terjadi secara konstitusional, karena dikeluarkan melalui *Staatsblad* yang merupakan regulasi konstitusional di *Groundwet* di Negeri Belanda.

Pada tahun 1941, dipicu serangan Jepang ke pangkalan angkatan laut Amerika Serikat –yang merupakan sekutu Belanda- di Pearl Harbour, Hawaii membuat kekuatan kolonial Belanda melemah di Hindia-Belanda sehingga pada tahun 1942, Jepang memiliki keleluasaan untuk memulai menerapkan tatanan hukumnya di Indonesia. Berlakunya undang-undang pendudukan Jepang yang disebut *Gun Seirei* melalui *Osamu Seirei*, menandai berhentinya keberlakuan *Indische Staatsregeling* di Indonesia. Ini berarti bahwa perubahan tatanan hukum tersebut terjadi secara revolusioner.

Pun dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang memberhentikan berlakunya tatanan hukum pendudukan Jepang di Indonesia. Proses sosial-politik dan keberlakuan UUD yang tidak didasari oleh tatanan hukum pendudukan Jepang berarti berlakunya tatanan hukum nasional ini adalah tatanan yang lahir secara revolusioner.

2. Sementara tatanan hukum yang berlaku pada masa kemerdekaan yang ditandai dengan proklamasi tidaklah dapat sepenuhnya memberikan jawaban terhadap tatanan hukum nasional yang dicita-citakan. Kondisi sosial-politik yang mengharuskan

pemerintahan saat itu memikirkan bagaimana mempertahankan kemerdekaan jauh lebih dipertimbangkan dibanding menyusun tatanan hukum nasional yang baik, sehingga pada saat itu Indonesia masih mengadopsi kitab undang-undang kolonial selama tidak bertentangan dengan dasar negara dan kepentingan pemerintahan Indonesia. Pengadopsian undang-undang kolonial ini merupakan bentuk penggunaan asas konkordansi pada tatanan hukum Indonesia.

Sebelum mengakhiri bagian kesimpulan ini, penulis ingin mengutip pernyataan Soetandyo Wignjosoebroto yang juga oleh penulis anggap sebagai sebuah jawaban tentang problematika upaya pembangunan tatanan hukum Indonesia pada masa pasca kemerdekaan.

“Pada dasarnya dan pada awalnya pemuka-pemuka Indonesia dengan semangat nasionalisnya mencoba membangun hukum Indonesia dengan mencoba sedapat-dapatnya melepaskan diri dari ide hukum kolonial, yang ternyata tidak mudah. Inilah periode yang berawal dengan keyakinan bahwa substansi hukum rakyat yang selama ini terjajah akan dapat diangkat dan dikembangkan secara penuh menjadi substansi hukum nasional. Namun, yang terjadi di alam kenyataan ialah bahwa segala upaya itu berakhir dengan pengakuan bahwa proses realisasi ide hukum itu ternyata tidak sesederhana model-model strategiknya dalam doktrin. Kesulitan telah timbul bukan hanya karena keragaman hukum rakyat yang umumnya tak terumus secara eksplisit itu saja, akan tetapi juga karena sistem pengelolaan hukum yang modern meliputi tata organisasi, prosedur-prosedur dan asas-asas doktrinal pengadaan dan penegakannya telah terlanjur tercipta sepenuhnya sebagai warisan kolonial yang tak akan mudah dirombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat. Membangun hukum nasional dengan bermula dari titik nol, apalagi bertolak dari suatu

konfigurasi yang masih harus ditemukan terlebih dahulu, jelaslah kalau tidak, mungkin.”⁸³

Pernyataan Soetandyo ini menunjukkan bahwa relasi antara pembentukan suatu tatanan hukum dengan suatu peristiwa sosial-politik sangatlah berpengaruh. Pembentukan tatanan hukum yang baru pada suatu peristiwa sosial yang besar seperti revolusi, akan menjadi tantangan bagi terbentuknya tatanan hukum yang baru tersebut. Apakah tatanan hukum yang baru tersebut dapat mengakomodir ide hukum nasional dalam waktu yang singkat? Ataukah tatanan hukum tersebut gagal dalam menyusun tatanan hukum tersebut dan masih menggunakan ide hukum yang kolonial telah ada sebelumnya?

Merujuk pada objek kajian dalam tulisan ini, yakni kondisi pembentukan hukum nasional pasca revolusi fisik dan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 maka terlihat bahwa Indonesia kesulitan dalam membentuk tatanan hukumnya sendiri yang sesuai dengan ide-ide hukum nasional. Banyaknya undang-undang yang harus dikondorkansi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pidana serta perundang-undangan yang lainnya menunjukkan bahwa ide hukum kolonial masih menjadi sandaran hukum di Indonesia pasca kemerdekaan.

⁸³ Soetandyo WignjoSoebroto, *Op.Cit.*, hlm.175

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menganggap bahwa perlunya memahami tatanan hukum Indonesia di saat sekarang dan di masa lalu, khususnya pada saat pasca kemerdekaan Indonesia. Kondisi sosial-politik pada masa kemerdekaan memang merupakan tantangan besar saat upaya pembangunan tatanan hukum nasional dimulai. Ini harusnya menjadi refleksi bagi para pemikir dan praktisi dalam mengkaji lebih jauh lagi tentang tatanan hukum kita sekarang. Apakah tatanan hukum yang sekarang telah menjawab kebutuhan ide hukum nasional yang dicita-citakan dulu?

Masih berlakunya beberapa kitab undang-undang hasil konkordansi hukum kolonial, merupakan salah satu contoh bahwa Indonesia saat ini belum mampu melakukan pembaharuan tatanan hukum yang dapat merefleksikan ide hukum nasional.

Selain itu, beberapa asas hukum yang ternyata pada masa lalu mencerminkan upaya politik pihak koloni haruslah kembali dipahami oleh para pemikir hukum kita. Asas unifikasi hukum, supremasi hukum, dan konkordansi adalah beberapa diantaranya harus dikaji lebih mendalam utamanya dalam kajian kritis.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAHAN HUKUM :

- Alwi Wahyudi, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia : Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo, Depok.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2014. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Mahfud M.D., 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Muhammad Yamin, 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Romi Librayanto, 2012. *Ilmu Negara*, Pustaka Refleksi: Makassar.
- Satjipto Rahardjo, 1986. *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sekretariat Negara RI, 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, Sekretariat Negara RI , Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2014. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Epistema Institute, Jakarta.
- Sri Soemantri, 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni Bandung.
- Widodo Dwi Putro, 2011. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

BAHAN NON HUKUM:

Jalaluddin Rakhmat, 1999. *Rekayasa Sosial : Reformasi atau Revolusi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Tan Malaka, 2013, *Aksi Massa*, NARASI, Yogyakarta.

Yudi Latif, 2012. *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dn Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

JURNAL :

R.Z. Leirissa, *Charles Tilly dan Studi tentang Revolusi*, Jurnal Sejarah, 6:1, Pekanbaru.